



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Jl. Basuki Rahmat No. 55 Samarinda 75117

Telp. (0541) 742482 Fax. (0541) 742495

Website: <http://indagkop.kaltimprov.go.id>

Website: <http://indagkop.kaltimprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dibidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Dinas Perindagkop & UMKM) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Dinas Perindagkop & UMKM telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Dinas Perindagkop & UMKM ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.

Perencanaan strategis ini juga harus dipandang sebagai suatu perubahan paradigma, dimana SKPD tidak lagi sekedar mengedepankan kewenangan semata dalam melaksanakan tugas, namun lebih memfokuskan pada peranan yang dapat diberikan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2014 - 2018.

Akhirnya, *Rencana Strategis Tahun 2014-2018* Dinas Perindagkop & UMKM ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja).
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Menyusun Penetapan Kinerja (Performance agreement);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Dinas Perindagkop & UMKM.
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan
6. Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Samarinda, 10 Juli 2014

Kepala Dinas,

H. MOHAMMAD DJAILANI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570525 198203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	I - 1
1.2.	Landasan Hukum	I - 3
1.3.	Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4.	Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	II - 1
2.2.	Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	II - 10
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	II - 15
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	II - 46
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	III - 1
3.2.	Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 9
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian	III - 13
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 15
3.5.	Penentuan Isu – Isu Strategis	III - 16
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1.	Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	IV - 1

4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	IV - 9
4.3.	Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	IV - 19
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Rencana Program dan Kegiatan	V - 1
5.2	Pendanaan Indikatif	V - 16
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
6.1.	Indikator Kinerja	VI - 1



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Rencana strategis (renstra) SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan



antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan menilai hasilnya melalui umpan balik yang terukur. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur merancang renstra secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian semua tujuan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.

Perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan langkah awal dan pedoman pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan rencana kerja yang akan dilakukan dengan melibatkan semua potensi sumberdaya yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, *stakeholder* terkait dan masyarakat umum yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan ketersediaan sumber daya lainnya yang ada di Kalimantan Timur dan sekitarnya, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap tuntutan perkembangan lingkungan strategis rasional, sosial dan global.

Perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini merupakan dokumen yang didalamnya menggambarkan upaya pencapaian target selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tahun 2013 sampai



dengan tahun 2018, dimana penyusunannya didasarkan pada potensi, peluang, hambatan/kendala dan tantangan. Penyusunan rencana strategis juga memperhatikan rencana strategis pada Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi & UKM RI dan rencana strategis SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Indonesia tahun 2017 nomor 68);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik



- Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 8. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025; dan
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tahun 2013-2018 dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tahun 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:



1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menynergikan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM pada level nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang industri dan perdagangan, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang industri dan perdagangan di Kalimantan Timur 2008-2013 dan tantangan serta peluang pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur.



BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang Industri dan Perdagangan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2013-2018.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VI memuat indikator kinerja pembangunan industri dan perdagangan yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan



5 (lima) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur dalam kaidah pelaksanaan.



Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tugas DISPERINDAGKOP dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;



7. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur; dan
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan;
- b. Melakukan penyiapan bahan urusan umum dan kehumasan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;



- c. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan;
dan
- d. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.

C. Kepala Bidang Industri

Kepala Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyiapan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro Hulu dan Hilir, industri logam mesin, elektronika, mesin, transportasi dan aneka (ILMETA), mengkoordinasikan kerjasama kemitraan bidang industri, memberikan masukan /saran dalam rangka penerbitan izin usaha industri skala investasi diatas 10 milyar, dan izin kawasan industri lintas Kabupaten/kota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Industri mempunyai fungsi:

1. Menyusun, merumuskan dan Mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana usaha, produksi, evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan kerjasama antara industri kecil menengah, industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
2. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan iklim, usaha, industri , informasi industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro, industri logam mesin, elektronika telematika, transportasi dan aneka ILMETA;
3. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro, industri logam mesin, elektronika, telematika, transportasi dan aneka ILMETA serta standarisasi dibidang industry;
4. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kab/kota di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro industri logam mesin, elektronika, telematika, transportasi dan aneka ILMETA;



5. Mengkoordinasikan dan menyusun standarisasi, norma, pedoman dan kriteria di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro, industri logam mesin, elektronika, telematika, transportasi dan aneka ILMETA;
6. Mengkoordinasikan, memberikan masukan /saran teknis dalam rangka penerbitan ijin Usaha industri skala investasi diatas 10 milyar, dan ijin kawasan industri lintas kabupaten/kota;
7. Monitoring dan evaluasi dan bantuan teknis pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh Kab/Kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan; dan
8. Membantu dan memfasilitasi standarisasi dan HaKI.

D. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang pembinaan pasar dan distribusi, melakukan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang jasa, perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan distribusi;
2. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi;
3. Bimbingan teknis di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi;
4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi;



5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi serta pelaporan;
6. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan laporan, serta penyajian informasi;
7. Koordinasi Pengendalian Inflasi;
8. Pengembangan pasar dalam negeri melalui pasar lelang, misi dagang dan promosi;
9. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen;
10. Bimbingan teknis di bidang bimbingan lembaga konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen; dan
11. Evaluasi pelaksanaan di bidang bimbingan lembaga konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen.

E. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan teknis pembinaan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri, promosi dan misi dagang, kerjasama luar negeri dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), serta penerbitan Angka Pengenal Importir (API).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

1. Merencanakan kegiatan bidang Perdagangan Luar Negeri sebagai acuan pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi bidang Perdagangan Luar Negeri guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
3. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan luar negeri dalam rangka pembinaan iklim usaha, pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha;



4. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekspor;
5. Menyusun bahan informasi, promosi dan misi dagang, dalam rangka perintisan dan pengembang pasar luar negeri;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
7. Meningkatkan kemampuan pengusaha dalam melakukan transaksi dan pemasaran di luar negeri;
8. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
9. Melaksanakan penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
10. Menyebarkan informasi perdagangan luar negeri baik melalui asosiasi/ Perindag/Dunia Usaha/Media;
11. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor termasuk pengawasan mutu barang impor;
12. Mengkoordinasikan persiapan pemantauan dan evaluasi pemberian API;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan promosi dan misi dagang luar negeri;
14. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional, bilateral maupun multilateral;
15. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri;
16. Memahami peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
17. Menyelesaikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai rencana; dan
18. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagai pertanggungjawaban.



F. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, menengah serta pemantauan/ pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan dan perkreditan Pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - a. Menyusun pola, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan, dan perkreditan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja di dalam dan diluar lingkungan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. Menganalisa pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. Memberikan petunjuk pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



G. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk pembinaan pengembangan pelayanan teknis terhadap industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) UPTD yaitu:

1. UPTD Metrologi

Kegiatan UPTD Metrologi mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan standart, melaksanakan tera/tera ulang, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta memberikan bimbingan teknis kepada para eksportir, eksportir produsen, importer dan dunia usaha lainnya.

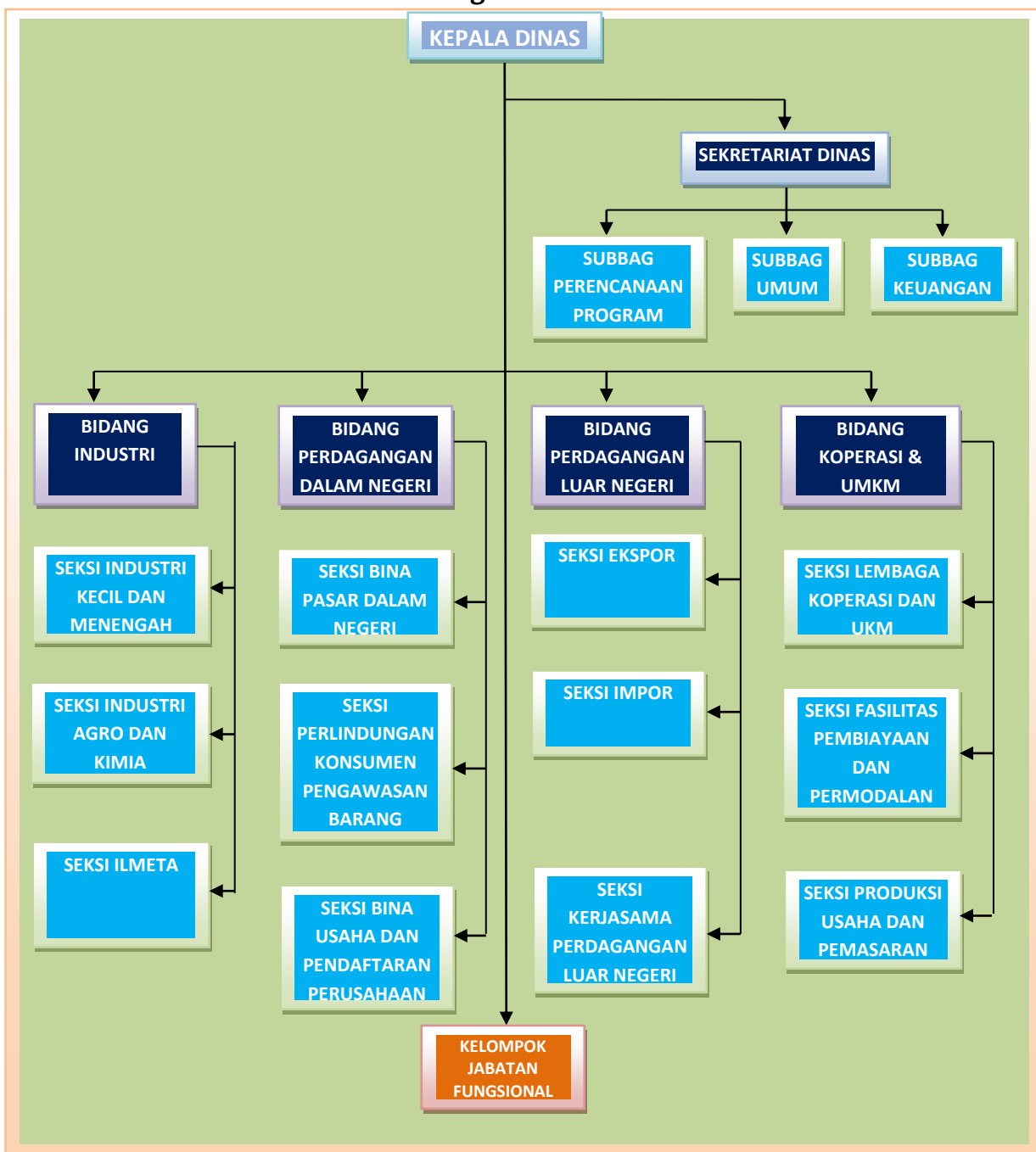
3. UPTD Pusat Pengembangan dan Promosi Kerajinan Kalimantan Timur

UPTD P3UKM mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan teknis kepada IKM dalam rangka pengembangan teknologi produksi dan transfer teknologi, menyediakan sarana pengembangan sumber daya manusia IKM dan aparat pembina dalam rangka pengembangan teknologi dan manajemen usaha, serta menyediakan sarana promosi dan pusat penjualan produk IKM dan UMKM Kalimantan Timur.



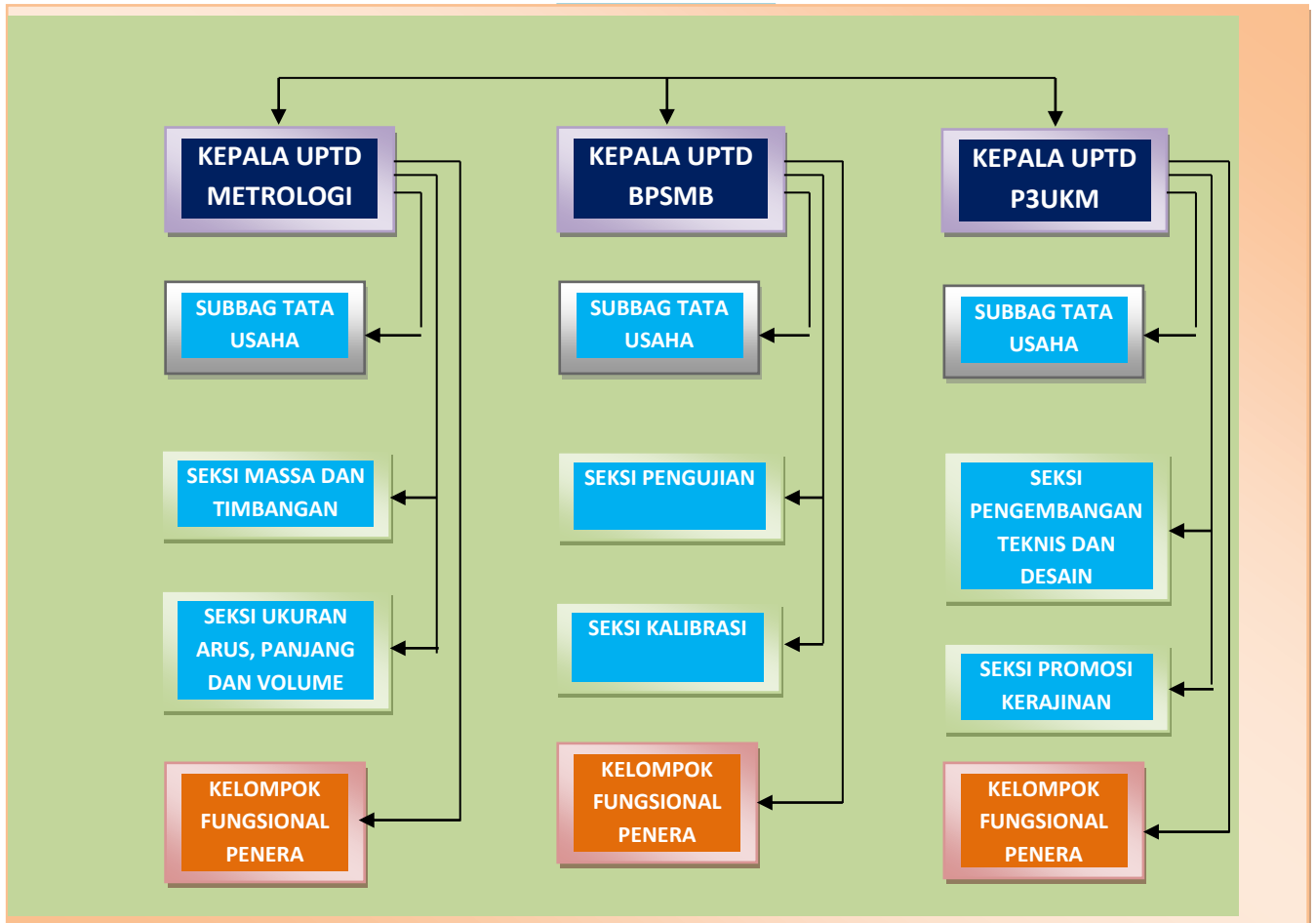
Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas





Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPTD



2.2. Sumber Daya Dinas Perrindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Januari tahun 2014 memiliki jumlah pegawai sebanyak 164 orang terdiri dari 114 orang laki-laki dan 50 orang perempuan sebagai pelaksana kegiatan SKPD sebagaimana dalam tabel 2.1 dan grafik 2.1 berikut.

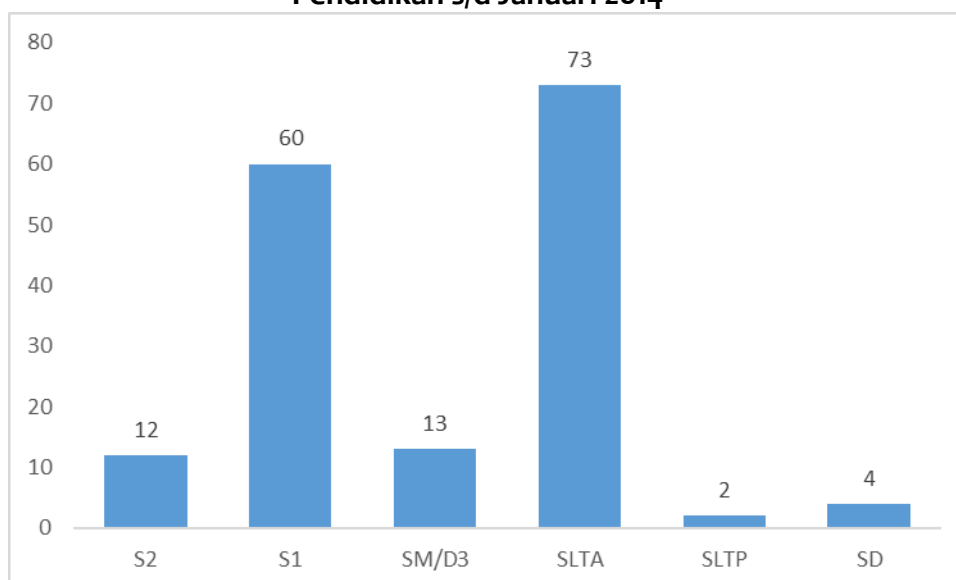


Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan s/d Januari 2014

No.	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	I	2
2	II	29
3	III	122
4	IV	11
Total Pegawai		164

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kalimantan Timur

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berdasarkan Pendidikan s/d Januari 2014



Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kalimantan Timur

Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada tabel 2.1 diatas didistribusikan ke dalam Sekretariat sebanyak 30 orang, Bidang Industri 22 orang, Bidang Perdagangan Dalam Negeri 14 orang, Bidang Perdagangan Luar Negeri 15 orang, Bidang Koperasi dan UMKM 19 orang, UPTD Metrologi 29 orang, UPTD BPSMB sebanyak 19 orang dan UPTD P3UKM sebanyak 15 orang. Dikaitkan dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan terdahulu, dimana terdapat 1 jabatan eselon II, 8 Jabatan eselon III dan 21 Jabatan eselon IV. Semua telah diduduki pejabat sesuai keputusan Gubernur, sisanya sebanyak 132 orang sebagai pelaksana teknis dan administrasi di masing-masing Sekretariat/bidang dan UPTD. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Jabatan/Eselon – Laki-laki dan Perempuan s/d Januari 2014

No	Bidang	Jabatan/Eselon									
		II		III		IV		Pelaksana		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sekretariat	1	0	0	1	1	2	16	10	18	13
2.	Bidang Industri	0	0	1	0	1	2	12	6	14	8
3.	Bidang PDN	0	0	1	0	1	2	8	2	10	4
4.	Bidang PLN	0	0	1	0	2	1	9	2	12	3
5.	Bidang Kop & UMKM	0	0	1	0	1	2	11	4	13	6
6.	METROLOGI	0	0	1	0	3	0	20	5	24	5
7.	BPSMB	0	0	1	0	2	0	8	8	11	8
8.	P3UKM	0	0	1	0	2	1	9	2	12	3
J U M L A H		1		7	1	13	8	93	39	114	50

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kalimantan Timur

Tabel 2.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Januari 2014

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Sekretariat	1	1	2	0	10	3	1	1	3	7	1	1	18	13
2.	Bidang Industri	0	0	0	0	5	3	0	0	6	4	3	1	14	8
3.	Bidang PDN	0	0	0	0	4	1	2	0	3	3	1	0	10	4
4.	Bidang PLN	0	0	0	0	5	1	0	0	6	2	1	0	12	3
5.	Bidang Koperasi & UMKM	1	0	0	0	6	3	1	0	5	2	0	1	13	6
6.	METROLOGI	0	0	0	0	12	2	3	3	6	0	3	0	24	5
7.	BPSMB	1	0	0	0	4	5	0	2	6	1	0	0	11	8
8.	P3UKM	0	0	0	0	8	1	0	0	4	2	0	0	12	3
J U M L A H		3	1	2	0	54	19	7	6	39	21	9	3	114	50

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kalimantan Timur



Dalam tabel 2.3 berikut ini dapat dijelaskan bahwa distribusi pegawai untuk Sekretaris sebanyak 31 orang, sebanyak 13 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2, sisanya sebanyak 10 orang berpendidikan SLTA kebawah, sementara untuk bidang industri dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang, 14 orang diantaranya berpendidikan S1/S2, sisanya sebanyak 18 orang berpendidikan SLTA kebawah, sedangkan bidang perdagangan dalam negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 14 orang, diantaranya sebanyak 9 orang berpendidikan S1/S2, sisanya 5 orang berpendidikan SLTA selanjutnya untuk bidang perdagangan luar negeri dengan jumlah pegawai 15 orang, hanya 6 orang berpendidikan SLTA dan 9 orang berpendidikan S1/S2, kemudian untuk bidang koperasi dan UMKM dengan jumlah pegawai sebanyak 19 orang, sebanyak 9 orang berpendidikan D3/S1/S2 dan sisanya sebanyak 10 orang berpendidikan SLTA kebawah untuk Unit Pelaksana Teknis daerah Metrologi memiliki pegawai sebanyak 29 orang, 15 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2, sedang sisanya sebanyak 14 orang berpendidikan SLTA ke bawah. UPTD BPSMB yang memiliki pegawai sebanyak 19 orang, 9 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2 dan 10 orang sisanya berpendidikan SLTA ke bawah, sedangkan untuk UPTD P3UKM yang memiliki 15 orang pegawai, 6 orang diantaranya berpendidikan S1 dan 9 orang berpendidikan SLTA kebawah.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur tertera pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.4
Kondisi Sarana Kerja s/d Januari 2014

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah bangunan kantor	5 LS	Baik
2.	Rumah Dinas	11 buah	Baik
3.	Kendaraan Roda 4	14 buah	Baik



4.	Kendaraan Roda 2	21 buah	Baik
5.	Komputer PC	61 buah	15 (Rusak Ringan), 3 (Rusak Berat)
6.	Laptop	19 buah	Baik
7.	Mesin Tik	16 buah	3 (Rusak Berat)
8.	Mesin Hitung	1 buah	Baik
9.	Telepon	4 unit	1. (0541) 742482 PABX
			2. (0541) 747161
			3. (0541) 206335
			4. (0541) 736993
10.	Faximile	1 unit	Baik: (0541) 742495
11.	Mesin Foto Copy	1 unit	Kurang Baik
12.	Handycam	2 buah	1 (Rusak Ringan)
13.	Mesin Absen Digital	1 unit	Baik (belum operasional)

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kalimantan Timur

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Bulan Januari Tahun 2014

NO	URAIAN	KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan	5 LS	APBD
2.	Mobilitas	Pemeliharaan	16 unit	APBD/APBN
3.	Peralatan Kantor	Pemeliharaan	105 buah	APBD
4.	Lain-lain	Pemeliharaan	406 buah	APBD

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kalimantan Timur

3. Keuangan (Realisasi Anggaran Belanja DISPERINDAGKOP dan UMKM)

Tabel 2.6
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2012 dan 2013

No	Jenis Pendapatan	Target (jutaan Rp)		Realisasi (jutaan Rp)		Selisih (jutaan Rp)		%	
		2013	2015	2013	2015	2013	2015	2013	2015
1.	Retribusi Tera dan Tera Ulang	223,00	357,50	477,67	-	254,67	-	214,20	-



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

No	Jenis Pendapatan	Target (jutaan Rp)		Realisasi (jutaan Rp)		Selisih (jutaan Rp)		%	
		2013	2015	2013	2015	2013	2015	2013	2015
2.	Retribusi Pengujian dan Kalibrasi	120,00	219,00	146,63	-	26,63	-	122,19	-
3.	Retribusi Surat Keterangan Asal (SKA)	17,69	18,55	17,67	-	0,87	-	95,26	-
2.	Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan lain - lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		360,69	595,05	641,97	-	563,47	-	177,98	-

Tabel 2.7
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja APBD Tahun 2013

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi		SILPA	
		Rp.	%	Rp.	%
Belanja Tidak Langsung	Disperindagkop	10.530.518.877	78,60	2.870.462.123	21,40
	UPTD BPSMB	1.581.584.189	69,70	688.760.811	30,30
	UPTD Metrologi	2.457.655.557	81,30	565.222.443	18,70
Belanja Langsung	Urusan Pilihan Perindustrian	6.354.033.488	85,60	1.067.166.512	14,40
	• UPTD P3UKM	3.545.682.555	98,50	54.317.445	1,50
	Urusan Pilihan Perdagangan	16.384.849.480	82,80	3.408.150.520	17,20
	• UPTD Metrologi	35.442.472.392	59,00	24.587.527.608	41,00
	• UPTD BPSMB	4.670.762.362	92,70	369.237.638	7,30
	Urusan Wajib Koperasi	18.755.308.267	84,00	3.563.491.733	16,00
Jumlah Belanja		99.722.867.167	72,85	37.174.336.833	27,15



2.3. Kinerja Pelayanan DISPERINDAGKOP dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan sektor industri dan perdagangan memberikan dampak langsung pada perkembangan ekonomi secara makro pada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat Provinsi Kalimantan Timur menjadi tempat bernaungnya industri – industri yang besar sehingga secara makro diharapkan Kalimantan Timur mampu memberi peran sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah hingga nasional. Melihat hal tersebut, kontribusi sektor perdagangan dan industri serta UMKM dan Koperasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.8

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2009-2013 Provinsi Kalimantan Timur

No	Tahun	ADHB (Milyar Rupiah)	ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (persen)	
				ADHK non Migas	ADHK Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2009	78 131 959	31 666 162	1,49	3,97
2.	2010	80 672 727	30 779 604	3,28	2,80
3.	2011	91 461 374	29 020 968	2,41	5,71
4.	2012	98 494 375	27 257 060	9,87	6,08
5.	2013	104 456 000	29 890 000	9,52	6,06

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

Pada tabel 2.8 terlihat bahwa perkembangan sektor industri di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang secara bertahap pada tahun 2009 hingga 2013. Pada tahun 2009 terlihat laju pertumbuhan pada harga konstan senilai 3,97 dan tahun 2013 senilai 6,06. Sektor industri sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian, khususnya pada PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.9

PDRB Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2009-2013 Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	16.956.036	19.279.620	22.866.420	25.796.122	28.658.808
2	Pertambangan dan Penggalan	130.834 648	152.597.430	196.161.893	198.835.276	182.538.602



No	Jenis Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Industri Pengolahan	78.131.959	80.672.727	91.461.374	98.494.375	104.456.214
4	Listrik, Gas dan Air Minum	812.322	895.025	1.023.315	1.120.289	1.192.155
5	Bangunan	7.761.097	8.859.156	10.323.466	12.487.169	14.494.878
6	Perdagangan , Hotel dan Restaurant	22.218.449	26.371.939	30.907.448	36.129.516	40.904.287
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10.530.251	12.034.967	14.044.932	16.652.193	18.752.990
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6.424.123	7.459.698	9.292.982	12.122.857	14.979.037
9	Jasa – jasa	11.921.937	13.593.870	15.326.662	17.463.822	19.452.403
	PDRB	285.590.822	321.764.430	391.408.492	419.101.619	425.429.376
	PDRB Non Migas	155.204.138	190.493.999	242.058.704	272.688.461	283.531.972

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai bidang-bidang dan UPTD yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dalam mengembangkan perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Timur demi meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Bidang-bidang tersebut antara lain:

1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan merupakan kegiatan perekonomian masyarakat yang mampu memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. DISPERINDAGKOP dan UMKM mempunyai peran yang penting dalam perkembangan perdagangan Provinsi Kalimantan Timur. Perdagangan mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi pada mayoritas masyarakat Kalimantan Timur. Sehingga pengembangan pasar di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.10
Jumlah Pasar Modern dan Tradisional Provinsi Kalimantan Timur

Kota/Kabupaten	Pasar			
	Modern	Jumlah Pedagang	Tradisional	Jumlah pedagang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Samarinda	62	1.300	25	5.817
Balikpapan	64	3.400	16	8.309
Bontang	7	395	9	1.129
Kutai Kartanegara	3	12	10	2.315
Kutai Timur	5	5	7	867
Kutai Barat	1	3	5	325
Pasir	2	6	29	1.120
Berau	3	5	31	850
Penajam	2	400	26	5.213
Jumlah	170	5.728	234	30.506

Pasar lelang komoditi Provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan hal tersebut terlihat pada tabel 2.9 yang nilai optimum transaksi pada tahun 2006 sebanyak 23 Triliun rupiah. Selama tahun 2007 hingga 2011 bergerak fluktuatif n dan pada tahun 2011 transaksi terlaksana 4 kali dengan total transaksi 1,7 Triliun.



Tabel 2.11
Pasar lelang komoditi Tahun 2006-2010 Provinsi Kalimantan Timur

No.	Tahun	Banyaknya Pelaksanaan	Total Transaksi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2006	5 kali	23.594.000.000
2	2007	3 kali	434.565.000
3	2008	4 kali	5.523.040.000
4	2009	3 kali	980.174.000
5	2010	3 kali	3.092.452.000
6	2011	4 kali	1.790.425.000

Melihat perkembangan pendirian usaha yang ada pada Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 hingga 2013 yang tertuang pada tabel 2.10 dan tabel 2.11, mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemandirian usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Timur dengan adanya perkembangan penerbitan SIUP dan TDP oleh DISPERINDAGKOP dan UMKM. Sehingga melihat perkembangan ini dapat dikatakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menggeliat dan mampu menunjukkan pergerakan yang positif.

Tabel 2.12
Perkembangan Penerbitan SIUP Tahun 2008-2013 Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	SIUP-PMIK	SIUP-PK	SIUP-PM	SIUP-PB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	-	2.483	1.163	873	4.519
2009	-	2.608	1.060	763	4.431



Tahun	SIUP-PMIK	SIUP-PK	SIUP-PM	SIUP-PB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	126	4.577	1.751	1.087	7.541
2011	56	3.803	1.359	784	6.002
2012	70	4.146	1.669	519	6.404
2013	60	4.291	1.661	206	6.218
Total s/d 2013	312	51.921	19.874	8.766	80.873

Tabel 2.13
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2008-2013 Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	PT	Koperasi	CV	Fa	PO	BPL	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2008	1.109	137	2.048	30	752	17	4.093
2009	552	78	1.176	-	647	6	2.459
2010	1.816	246	3.251	4	1.696	15	7.028
2011	1.626	219	2.929	-	1.328	18	6.120
2012	1.561	279	3.109	2	1.187	26	6.164
2013	1.586	190	3.319	-	1.433	35	6563
Total s/d 2013	14.868	2.659	33.683	45	21.620	459	73.404



2) Bidang Perdagangan Luar Negeri

Dalam perkembangan globalisasi dunia dalam bidang perdagangan, mampu menekan perkembangan perdagangan dalam negeri. Sehingga gejolak ini mampu merangsang adanya perluasan perdagangan luar negeri. Provinsi Kalimantan Timur yang berlimpah kekayaan alamnya, diharapkan mampu menjadi pendukung sektor perindustrian yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Berhubungan dengan hal tersebut, DISPERINDAGKOP dan UMKM menunjukkan kinerjanya, sehingga mampu merealisasikan pada ekspor komoditi utama yang terlihat pada tabel 2.12. Dalam realisasi ekspor komoditi utama terlihat bahwa pada tahun 2009 senilai 9 juta (US\$) hingga tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang positif senilai 19 juta (US\$). Namun pertumbuhan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan penurunan. Hal ini menjadi kewaspadaan bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyikapi perkembangan ekspor ini.

Tabel 2.14
Realisasi Ekspor Komoditi Utama Tahun 2009-2013 Provinsi Kalimantan Timur (US.\$)

No.	Komoditi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertambangan	8.640.085,90	11.364.907,17	17.143.704.033	16.787.542.947	16.022.616.720
2	Hasil Kayu Olahan	257.918,57	363.130,92	413.070.270	414.703.273	442.224.702
3	Hasil Industri Kimia	446.398,30	644.776,53	883.677.550	973.233.768	890.609.879
4	Hasil Perikanan dan Kelautan	140.432,38	170.072,65	178.594.504	151.539.065	171.319.163
5	Hasil Hutan Ikutan	66,38	64,54	57.289	37.062	4.959
6	Hasil Pertanian dan Perkebunan	178.798,98	337.832,36	467.623.918	270.547.236	283.481.286



7	Hasil Industri Logam	269.298,38	68.922,16	83.157.159	102.631.208	10.825.197
Lain-Lain		18.593,89	5.719,65	22.032.316	92.665.441	309.994.857
Jumlah		9.951.592,78	12.955.425,98	19.191.917.039	18.792.354.543	18.131.076.763

Sumber data: Bank Indonesia dan BPS

Berdasarkan tabel 2.13 perkembangan nilai ekspor dan impor pada komoditi migas dan non migas di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009-2013 menunjukkan agregat fluktuaktif. Namun perkembangan fluktuaktif ini menunjukkan nilai yang cukup baik terlihat pada pengadaan import migas yang menunjukkan nilainya semakin bertambah dari tahun ke tahun namun tidak melebihi nilai ekspornya. Pada tahun 2009-2011 ekspor migas beranjak naik dengan nilai 17 ribu (U\$) dan pada tahun 2012 menurun menjadi 14 ribu (U\$) hingga tahun 2013 menurun dengan nilai 12 ribu (U\$). Namun pada Hal ini berarti bahwa pada komoditi migas dan migas dapat dikatakan Provinsi Kalimantan Timur mampu memenuhi kebutuhan migas dan non migas walaupun masih harus mengimport dari Negara lain. Perkembangan nilai impor ini juga terlihat pada tabel 2.14 dengan banyaknya penerbitan API oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Tabel 2.15
Perkembangan Nilai Ekspor, Import Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (US\$)

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ekspor					
	1. Migas	9.290,89	11.004,00	17.324,85	14.999,65	12.752,82
	2. Non Migas	9.951,59	12.955,42	19.191,92	18.792,90	18.131,08
	Total	19.242,18	23.959,42	36.516,77	33.792,55	30.883,90
2	Import					
	1. Migas	3.241,52	3.810,82	4.378,58	5.338,31	7.185,61
	2. Non Migas	2.588,36	1.633,88	1.934,40	2.805,23	2.255,73
	Total	5.829,88	5.444,70	6.312,98	8.143,54	9.441,34



	Surplus/Defisit	13.412,30	18.514,72	30.203,79	25.649,01	21.442,56
3	1. Migas	6.049,07	7,193.80	12.946,27	9.661,34	5.567,21
	2. Non Migas	7.363,23	11.321,54	17.257,52	15.987,67	15.875,35

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop & UMKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.16
Perkembangan Penerbitan API Provinsi Kalimantan Timur

No.	Komoditi Impor	Tahun penerbitan	Jumlah API	Negara Asal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	API- Umum/Perorangan	2008	67	Negara-negara Asia, Eropa, Afrika, China dll
		2009	55	
		2010	70	
		2011	75	
		2012	100	
		s/d Maret 2013	4	

3) Bidang Perindustrian

Berdasarkan Road Map Provinsi Kalimantan Timur maka prioritas pengembangan kluster industri adalah sebagai berikut:

A. Kelompok Kluster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Kluster industri), yaitu:

- 1) Kluster Industri Baja;
- 2) Kluster Industri Semen;
- 3) Kluster Industri Petrokimia;
- 4) Kluster Industri Keramik;
- 5) Kluster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik;
- 6) Kluster Industri Mesin Peralatan Umum;
- 7) Kluster Industri Tekstil dan Produk Tekstil; dan
- 8) Kluster Industri Alas Kaki.



- B. Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu:
- 1) Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit;
 - 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet;
 - 3) Klaster Industri Kakao;
 - 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa;
 - 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi;
 - 6) Klaster Industri Gula;
 - 7) Klaster Industri Hasil Tembakau;
 - 8) Klaster Industri Pengolahan Buah;
 - 9) Klaster Industri Furniture;
 - 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan;
 - 11) Klaster Industri Kertas; dan
 - 12) Klaster Industri pengolahan Susu.
- C. Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu:
- 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor;
 - 2) Klaster Industri Perkapalan;
 - 3) Klaster IndustriKedirgantaraan; dan
 - 4) Klaster Industri Perkeretaapian.
- D. Kelompok Klaster Industri Elektronikdan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu:
- 1) Klaster Industri Elektronika;
 - 2) Klaster Industri Telekomunikasi; dan
 - 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya.



- E. Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu:
- 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia;
 - 2) Klaster Industri Fashion; dan
 - 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni.
- F. Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu:
- 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan;
 - 2) Klaster Industri Garam;
 - 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias;
 - 4) Klaster Industri Minyak Atsiri; dan
 - 5) Klaster Industri Makanan Ringan.

Program bidang perindustrian pada Provinsi Kalimantan Timur digolongkan dalam 3 klaster sebagai berikut:

a. Klaster Industri Pengolahan (*manufacturing industry*)

Klaster ini merupakan salah satu dari dua sektor yang menjadi "The Leading Economic Sector" di Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dari sektor Industri Pengolahan (*manufacturing industry*) adalah yang terbesar kedua kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diantara sembilan sektor ekonomi setelah sektor pertambangan dan penggalian. Namun peranan tersebut masih didominasi oleh Industri Migas, sedangkan Industri non migas masih bergerak dan berkembang.

b. Klaster Industri A Industri yang berbasis Agro

Penetapan lokasi oleh Bupati Kutai Timur seluas 1.000 Ha berada di Desa Tanjung Golok. Sedangkan sawit yang telah tertanam mencapai 700 ribu hektar dan hingga 2013 diharapkan sudah dapat menembus luasan 1 juta hektar. Kegiatan lainnya berupa Kajian Studi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit Kalimantan Timur Tahun 2011



dan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kluster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi perkebunan dan proyeksi rantai Industri Hilir di Kalimantan Timur.

c. Klaster Industri yang berbasis Gas dan Kondensat

Produk Petrokimia yang terletak di Kawasan Industri Bontang dengan produk kimia berupa Urea, Amoniak, Soda ash, Amonium Nitrat dan Methanol.

Dengan melihat hasil produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Timur maka tabel 2.15 menunjukkan produk unggulan industri yang ada diseluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.17
Produk Unggulan Industri Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produk Unggulan
(1)	(2)	(3)
1	Samarinda	Kayu Lapis/ Plywood/ Industri Pengolahan Kayu, Sawmil; CPO, Galangan Kapal, Moulding, Industri Tenun, Industri Bengkel, Industri Lem, Kulit Buaya.
2	Balikpapan	Kayu Lapis (plywood), Mdf, Udang Beku, Kayu/sawmill, Galangan Kapal, Moulding, Bengkel Service, Industri Pengolahan rotan, Garmen.
3	Bontang	Pupuk urea dan Amoniak, Methanol, Hexamethylene Tetramine, Melamine, Industri Lem.
4	Tarakan	Kayu Lapis (plywood), Mdf, Udang Beku, Industri Pengolahan, Kayu/ sawmill, Moulding.
5	Kutai Kartanegara	Kayu Lapis (plywood), Mdf, Udang Beku, Industri Pengolahan Kayu/sawmill, Crude Palm Oil, Moulding, Bengkel Service, Kain Tenun Ulap Doyo.
6	Kutai Timur	Industri Pengolahan, Kayu/sawmill, Crude Palm Oil.
7	Kutai Barat	Bengkel Service
8	Pasir	Industri Pengolahan Kayu/sawmill, Crude Palm Oil, Galangan Kapal, Industri Pengolahan rotan.
9	PPU	Industri Pengolahan Batu Marmer.
10	Berau	Industri Pengolahan Kayu/sawmill, Pulp.
11	Bulungan	Industri Pengolahan Kayu/sawmill, Gas Methanol.
12	Malinau	-
13	Nunukan	Udang Beku, Industri Pengolahan Kayu/sawmil, Moulding, Industri Minyak Kelapa.
14	Tana Tidung	Data belum terinventarisir.



Dalam pengembangan usaha dan industri yang berwawasan agro (Agroindustri) pada penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan pada Provinsi Kalimantan Timur oleh masyarakat dan stakeholder dapat dilihat pada tabel 2.18 dan 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.18
Penggunaan Lahan dalam Usaha Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur

No	Kelompok Usaha	Luas
(1)	(2)	(3)
1	Rakyat	126.756 Ha
2	BUMN	17.237 Ha
3	Swasta	519.540 Ha
Jumlah		663.533 Ha

Tabel 2.19
Luas area perkebunan berdasarkan lokasi

No	Kab/Kota	Luas (Ha)		Jumlah (Ha)
		PBS	PR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penajam Paser Utara	15.925,50	10.000,00	25.924,00
2	Paser	32.000,00	5.000,00	37.000,00
3	Kutai Kartanegara	40.793,00	10.000,00	50.793,00
4	Kutai Barat	24.629,00	5.000,00	29.629,00
5	Kutai Timur	115.452,00	40.000,00	155.452,00
6	Berau	78.518,00	10.000,00	88.519,00
7	Bulungan	55.000,00	10.000,00	65.000,00
8	Malinau	28.000,00	2.000,00	30.000,00
9	Nunukan	70.888,50	10.000,00	80.000,00
10	Samarinda	-	9.668,50	9.668,50
11	Tanah Tidung	12.500,00	2.500,00	15.000,00
12	Provinsi	-	7.125,00	7.125,00
Jumlah		473.706,50	121.293,00	121.293,00

Dengan perkembangan yang ada, capaian kinerja DISPERINDAGKOP dan UMKM pada bidang perindustrian dapat dilihat pada tabel 2.18 sebagai berikut. Dalam tabel 2.19 ini terlihat bahwa pemenuhan target dan realisasi masih dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan hampir secara keseluruhan realisasi dari target capaian kinerja mampu direalisasikan. Namun kecenderungan realisasi target capaian kinerja menurun pada tahun 2013.



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Bidang Industri Tahun 2009-2013 Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Capaian (Tahun)									
			2009		2010		2011		2012		2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan IKM	Unit	208	191	240	237	248	245	247	268	230	103
2	Pertumbuhan Tenaga	Orang	2.127	2.084	2.195	2.158	2.257	2.229	2.248	1.317	2.094	903
3	Pertumbuhan Investasi IKM	Rp (juta)	3.464	3.402	3.600	3550	3.720	3.605	3.706	4.170	3.450	1.555
4	Pertumbuhan produksi IKM	Rp (juta)	2.298	2.241	2.161	2.250	2.232	2.250	2.223	2.148	2.070	950
	➤ IKM Kerajinan											
	a) Pertumbuhan unit usaha	Unit	56	52	69	68	72	72	72	73	67	25
	b) Pertumbuhan tenaga kerja	Orang	476	465	492	485	514	508	512	424	481	213
	c) Pertumbuhan investasi	Rp (juta)	878	859	910	900	939	920	939	515	880	387
	d) Pertumbuhan produksi	Rp (juta)	593	572	612	629	627	629	627	255	589	270
	➤ IKM pangan											
	a) Pertumbuhan unit usaha	Unit	66	63	72	71	73	73	73	159	69	26
	b) Pertumbuhan tenaga kerja	Orang	492	486	507	500	518	513	515	540	485	202
	c) Pertumbuhan investasi	Rp (juta)	802	795	831	821	858	837	858	2.511	803	351



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Capaian (Tahun)									
			2009		2010		2011		2012		2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	d) Pertumbuhan produksi	Rp (juta)	488	481	505	523	519	523	519	1.339	481	216
	➤ IKM sandang											
	a) Pertumbuhan unit usaha	Unit	41	37	46	45	47	47	47	19	42	16
	b) Pertumbuhan tenaga kerja	Orang	421	409	434	427	443	437	441	171	410	178
	c) Pertumbuhan investasi	Rp (juta)	702	689	727	717	749	726	744	749	693	317
	d) Pertumbuhan produksi	Rp (juta)	374	362	393	411	407	411	407	357	369	157
	➤ IKM kimia dan bahan											
	a) Pertumbuhan unit usaha	Unit	27	24	31	31	32	30	32	9	29	10
	b) Pertumbuhan tenaga kerja	Orang	404	397	417	408	428	422	427	96	396	155
	c) Pertumbuhan investasi	Rp (juta)	564	558	585	575	602	576	595	221	504	214
	d) Pertumbuhan produksi	Rp (juta)	328		346	364	360	364	360	112	319	143
	➤ IKM logam dan elektronika											
	a) Pertumbuhan unit usaha	Unit	18	15	22	22	24	23	23	8	23	7
	b) Pertumbuhan tenaga kerja	Orang	334	327	345	338	354	349	353	86	322	142



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Capaian (Tahun)									
			2009		2010		2011		2012		2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	c) Pertumbuhan investasi	Rp (juta)	518	501	547	537	572	546	570	167	570	260
	d) Pertumbuhan produksi	Rp (juta)	279	268	305	323	319	323	310	85	310	141
5	Pertumbuhan Industri besar	Unit	1	1	1	1	1	2	2	6	1	2
6	Pertumbuhan tenaga kerja yang terserap	Orang	497	528	507	754	535	856	831	2.158	865	398
7	Pertumbuhan investasi industri besar	Rp (juta)	328.894	346.115	404.522	507.260	487.276	586.130	526.109	158.125	614.223	266.764
8	Pertumbuhan produksi	Rp (juta)	196.250	212.665	217.830	384.005	268.518	487.699	312.650	58.750	378.330	173.270

Sumber: BPS dan Dinas Perindagkop & UMKM Provinsi Kalimantan Timur



4) Bidang Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga yang dibangun oleh masyarakat yang difasilitasi oleh DISPERINDAGKOP dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi ini diharapkan mampu membantu dalam pergerakan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan Koperasi telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum mampu mengubah struktur perekonomian daerah. Jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota dan volume usaha dari tahun ke tahun dalam perkembangannya mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga tahun 2012. Pada tahun 2010 jumlah koperasi 5.516 unit dan tahun 2012 sebanyak 6.140, kemudian tahun 2013 menjadi 5.976 unit melihat perkembangannya terjadi penurunan jumlah koperasi pada tahun 2013. Walaupun penurunan jumlah koperasi ini mengalami penurunan yang tidak tajam namun hal ini perlu diwaspadai. Karena melalui koperasi inilah roda-roda usaha kecil mampu berputar. Peggeliatan gerakan koperasi dibawah naungan Dinas PERINDAGKOP dan UMKM dapat dilihat pada tabel 2.20 sebagai berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2013 Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Koperasi	unit	5.516	5.856	6.140	5.976
2	Anggota Koperasi	orang	390.348	426.235	428.296	433.291
3	Volume Usaha	Rp (Juta)	1.561.900	1.576.551	2.055.193	1.871.204
4	Modal	Rp (Juta)	298.823	351.695	499.328	361.686
5	Sisa Hasil Usaha	Rp (Juta)	87.902	92.902	169.493	93.773

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop & UMKM Provinsi Kalimantan Timur



5) UPTD P3KM

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat pada tabel 2.20 dan tabel 2.21, tabel 2.22. Kemajuan ini merupakan dampak dari dukungan penuh DISPERINDAGKOP dalam menyejahterakan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur melalui pengembangan usaha kerakyatan ini.

Tabel 2.21
Perkembangan Pengusaha Mikro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 - 2013

TAHUN	INDUSTRI (UNIT)	PERDAGANGAN (UNIT)	JASA (UNIT)	JUMLAH (UNIT)	TENAGA KERJA (ORANG)	OMSET (JUTA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	3.714	7.621	2.518	13.853	-	20.113,00
2009	3.825	7.777	2.544	14.146	-	20.603,79
2010	4.820	9.410	3.699	17.929	-	46.000,00
2011	5.065	9.560	3.743	18.368	-	46.637,00
2012	5.645	10.707	4.172	20.524	-	52.233,00
2013	9.720	18.443	7.176	35.339	-	89.935,00

Tabel 2.22
Perkembangan Pengusaha Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 - 2013

TAHUN	INDUSTRI (UNIT)	PERDAGANGAN (UNIT)	JASA (UNIT)	JUMLAH (UNIT)	TENAGA KERJA (ORANG)	OMSET (JUTA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	302.288	33.861	26.072	362.221	723.130	8.776,14
2009	304.102	36.231	26.075	366.408	737.592	10.222,64
2010	308.393	39.921	29.099	377.413	759.648	93.373,00
2011	310.995	45.028	31.863	388.886	782.741	95.327,00
2012	323.434	46.829	33.138	406.006	814.051	99.140,00
2013	326.211	49.185	33.690	409.086	820.238	99.893,00



Tabel 2.23
Perkembangan Pengusaha Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 – 2013

TAHUN	INDUSTRI (Unit)	PERDAGANGAN (Unit)	JASA (Unit)	JUMLAH (Unit)	TENAGA KERJA (ORANG)	OMSET (JUTA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	109	421	276	806	14.072	2.290.143
2009	109	426	282	817	14.103	2.308.693
2010	112	433	288	833	14.167	2.656.127
2011	125	440	294	859	14.609	2.754.002
2012	131	466	311	908	14.857	2.987.300
2013	133	473	315	921	15.069	3.030.018

Sebagai dukungan serta bentuk perlindungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dari ketatnya persaingan usaha khususnya pelaku usaha pemodal besar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan produk-produk hukum yang bersifat protektif diantaranya :

- Telah ditetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang didalamnya mengatur tentang upaya Pemerintah dalam mensinergikan potensi dan keunggulan lokal dalam mendukung perkembangan koperasi dan UMKM dengan melibatkan peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Perkembangan investasi di Kalimantan Timur yang menunjukkan peningkatan diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor koperasi dan UMKM melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam rangka mendukung Gerakan Kalimantan Timur Bangkit 2013 dan sejalan dengan pencaangan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Penggerak Koperasi Tahun 2013 maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat mendukung dalam:

- Upaya mendudukan badan hukum koperasi setara dengan badan usaha ekonomi lainnya.



- Untuk memperjelas upaya-upaya pembinaan oleh stakeholder
- Upaya PROTEKTIF terhadap koperasi dan UMKM dalam iklim persaingan usaha yang ketat dan kompetitif dengan pelaku-pelaku usaha pemodal besar seperti perusahaan swasta skala besar yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, jasa, dagang serta pasar modern.
- Untuk kejelasan perlindungan terhadap Koperasi dan UMKM dan mengatur tentang kewajiban dan kewenangan stakeholder yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UMKM.

Dengan berdasarkan tabel 2.23 dapat terlihat kinerja yang telah dilakukan oleh UPTD P3KM dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2009 hingga tahun 2012 UPTD P3KM mampu merealisasikan target kinerjanya hampir 100%. Namun pada tahun 2013 target kinerjanya tidak semua tercapai dengan maksimal.



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

Tabel 2.24
Capaian Target dan Realisasi Kinerja UPTD P3UKM Tahun 2010-2013 Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun							
			2010		2011		2012		2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya design produk hasil industri	buah	36	43	51	51	63	63	87	87
	Jumlah proto type yang dihasilkan	buah	5	1	10	5	15	15	20	22
	Jumlah design yang dihasilkan	buah	5	5	7	5	10	10	10	1
	Jumlah hasil produk dari work shop kayu	buah	5	2	7	7	8	8	10	11
	Jumlah hasil produk dari rotan	buah	6	10	8	8	10	10	20	30
	Jumlah hasil produk dari work shop keramik	buah	10	15	12	12	10	10	10	0



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun							
			2010		2011		2012		2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	— Total produk UKM yang dipromosikan	Unit	214	314	235	500	259	500	300	450
	— Total hasil penjualan	Rp	4.707.000	9.707.000	5.177.700	10.000.000	5.695.470	17.000.000	6.000.000	8.000.000
	c. Hasil penjualan promosi produk industry sandang									
	— Total produk UKM yang dipromosikan	Unit	295	412	325	200	358	300	400	200
	— Total hasil penjualan	Rp	14.087.000	16.924.000	15.495.700	15.000.000	17.045.270	15.000.000	18.000.000	9.000.000



6) UPTD Metrologi

UPTD Metrologi mempunyai tugas memastikan pengukuran, kalibrasi dan akurasi peralatan pada bidang industri mampu menunjukkan skala yang sesuai dan akurat. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi merupakan unit penyelenggara pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan menera/menera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP). Untuk mendapatkan UTTP yang ukurannya benar, tepat dan teliti, maka harus dilakukan pengujian oleh Pegawai yang berhak pada Direktorat/Unit Metrologi Daerah. Dari hasil pengujian tersebut barulah dapat diketahui UTTP yang memenuhi syarat dalam hal kebenaran, kepekaan atau tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. UTTP yang memenuhi syarat akan dibubuhi tanda sah yang berlaku, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tanda batal. Rangkaian kegiatan pengujian sampai dengan pembubuhan tanda sah atau tanda batal ini di sebut tera. UTTP yang sudah bertanda tera sah yang berlaku dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi barang dagang. Ada beberapa cara untuk meyakinkan anda apakah suatu UTTP telah ditera sah atau ditera ulang sah, antara lain sebagai berikut:

- (1) Tanyakan kepada pemilik /pemakai/kuasa UTTP, apakah UTTP nya telah ditera sah atau ditera ulang sah untuk tahun yang sedang berjalan; dan
- (2) Melihat sendiri tanda sah yang berlaku yang ada pada salah satu bagian dari UTTP tersebut.

Untuk memberi kepastian hukum bagi setiap UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang serta dilakukan pengujian dibubuhi tanda-tanda tera sebagai berikut :

- (1) Tanda tera sah atau tanda tera batal dibubuhi dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya, saat dilakukan peneraan atau penera ulangan atau pengujian;



- (2) Tanda jaminan dibubuhi dan/atau dipasang guna menjamin agar UTPP atau bagian UTPP tidak dirubah; dan
- (3) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai yang berhak di bubuhkan dan/atau dipasang pada UTPP untuk diketahui siapa dan dimana UTPP tersebut pertama kali di tera.

Dalam melakukan kegiatannya tersebut capaian kinerja UPTD Metrologi selama tahun 2009 hingga 2013 dapat dilihat melalui tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja UPTD Metrologi Tahun 2009-2013 Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah alat UTPP	20.678	18.357	20.311	23.645	20.261
2	Jumlah wajib tera	6.451	5.854	7.181	8.434	8.398
3	Target uang tera (Rp)	170.000.000	190.000.000	210.000.000	223.000.000	285.000.000
4	Realisasi uang tera (Rp)	168.902600	178.351525	242.889950	477.675400	490.198000

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop & UMKM Provinsi Kalimantan Timur

7) UPTD BPSMB

Laboratorium Kalibrasi UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang telah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor : LK-100-IDN untuk ruang lingkup :

1. Temperatur ; Enclosure dan Thermometer
2. Tekanan ; Pressure Gauge (Pneumatic)
3. Volume ; Volumetric Glassware

Dengan masa berlaku 1 Agustus 2008 s/d 31 Juli 2012. Kemudian di re akreditasi dengan pengembangan ruang lingkup menjadi :

1. Temperatur ; Enclosure dan Thermometer
2. Tekanan ; Pressure Gauge (Pneumatic)



3. Volume ; Volumetric Glassware
4. Panjang ; Vernier Caliver
5. Massa ; Anak Timbangan dan Timbangan (Elektronik/Mekanik)
6. Waktu ; mechanical Stop Watch
7. Instrumen Analisis ; pH Meter

Masa Berlaku 27 September 2012 hingga 26 September 2016.

Selain laborstorium kalibrasi yang telah diakreditasi, pada tahun 2013 laboratorium pengujian pun mendapat akreditasi, Nomor : LP-774-IDN untuk komoditi Lada Putih, Crude Palm Oil (CPO) dan Biji Kakao, dengan masa berlaku 19 September 2013 s/d 18 September 2017.

Pada tahun 2013 pelayanan jasa teknis yang telah diberikan oleh UPTD BPSMB berupa :

1. Kalibrasi peralatan telah mencapai 1514 alat yang berasal dari perguruan tinggi, perusahaan dan instansi pemerintah yang ada di Samarrinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Pasir, Berau dan Tarakan.
2. Pengujian contoh baru mencapai 5 contoh, meliputi Komoditi Palm Kernel Oil (PKO), Lada Putih, CPO dan Biji Kakao yang berasal dari pedagang pengumpul dan perusahaan yang berada di Samarinda ,dan Pasir.
3. Pelatihan Teknis Kalibrasi, peserta berjumlah 27 orang, berasal dari perusahaan di Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur, kualifikasi instruktur : Asesor Laboratorium Kalubradi sedangkan pendamping instruktur pegawai UPTD BPSMB.
4. Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17025-2008 pada Politeknik Pertanian Samarinda.

Kegiatan pelayanan UPTD BPSMB ini telah dipayungi oleh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur yaitu Perda Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Adapun target pendapatannya berjumlah Rp. 120.000.000,- sedangkan realisasinya s/d 15 Desember 2013 berjumlah Rp. 146.630.000,-



Tabel 2.26
Jangkauan Wilayah Contoh Pengujian
Tahun 2008 s/d 15 Desember 2013

No.	Daerah Asal	Customer	Keterangan
1.	Kota Samarinda	1. CV. Berdikari Mandiri 2. PT. Berdikari Niaga Utama 3. PT. Berla Mitra 4. PT. United Kaltim Pepper 5. PT Morina Survei Indonesia cabang Samarinda 6. PT. Sumber Alam Mitra Indonesia Cabang Samarinda 7. Pedagang Pengumpul 8. Pedagang Pengumpul	Lada Putih Lada Putih Biji Kakao
2	Kutim	1. Pedagang Pengumpul 2. Pedagang Pengumpul	Lada Putih Biji Kakao
3	Pasir	1. PTP XVIII	CPO
4.	Kabupaten Kutai Barat	1. PT. REA Kaltim Plantation 2. PT. Prima Matra Jaya	

Tabel 2.27
Jangkauan Wilayah Kalibrasi Peralatan
Tahun 2008 s/d 15 Desember 2013

No.	Daerah Asal	Customer	Bidang
1.	Samarinda	1 . PT. Carsurin	1. Temperatur 2. Massa 3. Waktu 4. Volume 5. Panjang
2 . PT. MAL		1. Volume 2. Massa	
3. PT. Padang Parit Global		1. Suhu	
4. PT. Lima Pendawa		1. Massa	
5. PT. REA		1. Temperatur 2. Waktu 3. Volume 4. Massa	
6. PT. London Sumatera		1. Instrumen Analisis	



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

No.	Daerah Asal	Customer	Bidang
		7. PT. Geoservice	1. Massa 2. Volume 3. Instrumen Analisis
		8. PT. SGS	1. Instrumen Analisis 2. Panjang 3. Suhu
		9. PT. ALS Sanga-sanga	1. Massa
		10. PT. Anugrah Bara Kaltim	1. Suhu 2. Volume 3. Massa
		11. PT. CCI	1. Suhu 2. Massa 3. Waktu
		12. PT. Intertek	1. Suhu 2. Massa 3. Panjang
		13. PT. Sucofindo	1. Suhu 2. Volume 3. Waktu
		14. Lab Nur Asih	1. Suhu 2. Volume 3. Massa 4. Waktu 5. Panjang
		15. BPSMK Balitbangda	1. Massa 2. Suhu 3. Instrumen Analisis 4. Panjang
		16. PT. IOL	1. Suhu 2. Massa 3. Waktu 4. Panjang
		17. PT. JAMMMIN (Jasa Mutu Mineral)	1. Suhu
	Samarinda	18. BPTP	1. Volume 2. Instrumen Analisis 3. Massa
		19. PT. Syam Surya Mandiri	1. Suhu 2. Massa
		20. Baristand	1. Suhu 2. Volume 3. Massa 4. Instrumen Analisis
		21. Politeknik Unmul	1. Suhu 2. Volume 3. Massa



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

No.	Daerah Asal	Customer	Bidang
			4. Instrumen Analisis
		22. Lab. Kesehatan	1. Massa 2. Suhu
		23. LPPMHP	1. Volume 2. Suhu
		24. PT. WIKA	1. Tekanan 2. Volume
		25. Balai K3	1. Massa
		26. Balai Karantina Pertanian	1. Suhu 2. Volume 3. Massa
2.	Balikpapan	1. PT. Carsurin	1. Volume 2. Suhu 3. Massa
		2. PT. Geoservice	1. Massa
		3. CV. Cahaya Indah	1. Suhu
		4. PT. Sucofindo	1. Massa
		5. CV. Labindo	1. Instrumen Analisis
		6. PT. Sumber Subur Sejati	1. Massa 2. Panjang
		7. PT. Cakra Jaya	1. Volume
		8. PDAM BPP	1. Suhu 2. Panjang
		9. PT. Prasindo Raya	1. Suhu
		10. PT. Pertamina	1. Suhu 2. Volume 3. Waktu 4. Tekanan
		11. PT. Air Kristal	1. Suhu 2. Instrumen Analisis
		12. PT. Sucofindo	1. Massa
		13. Balai Karantina Pertanian	1. Suhu 2. Volume 3. Massa 4. Instrumen Analisis
		14. BKI	1. Suhu 2. Volume 3. Massa 4. Instrumen Analisis
		15. PT. Guyana	1. Suhu 2. Volume 3. Massa 4. Tekanan
		16. PT. Cahaya	1. Suhu
3.	Kukar	1. PDAM Tenggarong	1. Suhu 2. Massa



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

No.	Daerah Asal	Customer	Bidang
			3. Instrumen Analisis 4. Spektrofotometer
4.	Bontang	1. PT. Carsurin	1. Waktu 2. Panjang 3. Massa
5.	Kubar	1. Badan Lingkungan Hidup (BLH)	1. Volume 2. Instrumen Analisis 3. Suhu
6.	Kutim	1. PT. Geoservice	1. Massa
		2. PT. Prima Mitra Jaya Mandiri	1. Suhu 2. Volume 3. Massa
7.	PPU	1. UD. Alfaluk Aditirta	1. Massa 2. Waktu
8.	Pasir	1. PT. Sucofindo	1. Suhu 2. Volume 3. Massa 4. Waktu 5. Panjang
9.	Berau	1. PT. Persada Sukses Makmur	1. panjang
		2. PT. CCI	1. Suhu 2. Massa 3. Waktu
		3. PT. Geoservice	1. Massa 2. Volume
10.	Tarakan	1. Balai Karantina Pertanian	1. Massa 2. Suhu
		2. BPLH	1. Instrumen Analisis
		3. LPPMHP	1. Suhu 2. Volume 3. Massa 4. Instrumen Analisis 5. Tekanan
		4. PT. Bonanza Pratama Abadi	1. Massa 2. Suhu
		5. PT. Sumber Kalimantan Abadi	1. Massa 2. Suhu
		6. PT. Tonga Tiur Putra	1. Suhu
		7. Pt. Mustika Minanusa Aurora	1. Massa 2. Suhu
		8. PT. Panca Mitra Multi Perdana	1. Suhu 2. Massa
11.	Banjar Baru	1. PT. Carsurin	1. Massa



Adapun kegiatan yang telah dilakukan di laboratorium pengujian Sampai dengan 15 Desember 2013, antara lain :

Tabel 2.28
Jumlah Komoditi yang di uji UPTD BPSMB
Tahun:2008 s/d 15 Desember 2013

NO	NAMA KOMODITI	2008	2009	2010	2011	2012	s/d 15 Desember 2013
1	Lada	1	1	1	8	-	1
2	Biji Kakao	-	-	-	-	-	5
3	CPO	-	2	-	-	3	5
4	The	-	-	-	-	-	-
5	Kayu Manis	-	1	-	-	-	-
6	Kopi Bubuk	-	1	-	-	-	4
7	Inti Sawit	-	-	-	-	1	-
8	Panili	-	-	-	1	-	-
9	Beras	-	-	-	-	-	-
10	Gabah	-	-	-	-	-	-
11	Minyak Nilam	-	-	-	-	-	-
12	PKO (Palm Kernel Oil)	-	-	-	-	-	1
13	Limbah Cair	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	1	5	1	7	4	18

Adapun kegiatan operasional dalam pengujian sampel dan kalibrasi alat yang telah dilakukan di laboratorium UPTD BPSMB Sampai dengan 15 Desember Tahun 2013, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.29
Jumlah Peralatan yang di kalibrasi UPTD BPSMB
Tahun: 2008 s/d 15 Desember 2013

NO	NAMA ALAT	2008	2009	2010	2011	2012	s/d 15 Desember 2013
1	Volumetrik	23	87	321	182	220	826
2	Temperatur Enclasure	18	79	119	161	180	256
3	Massa	7	96	58	94	189	179
4	pHmeter	-	-	3	9	19	225
5	Thermometer	-	-	52	69	73	195
6	Vernier caliper	-	-	4	7	15	18
7	Stopwatch	-	-	13	21	17	31
8	Pressure Gauge	-	-	-	-	-	9
9	Weigth Set	-	-	-	-	-	122
10	Spektrofotometer	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	48	262	570	543	713	1862



2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan DISPERINDAGKOP dan UMKM

Provinsi Kalimantan Timur

Berikut ini adalah peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur.

2.4.1. Peluang

1. Kebijakan MP3EI di Kalimantan Timur.
2. Kebijakan-kebijakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.
3. Peluang Pasar Ekspor yang cukup banyak.
4. Meningkatnya jumlah pasar di daerah.
5. Peraturan daerah terkait pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pembentukan Jamkrida dan Program CSR.
6. Program Pembiayaan baik melalui dana bergulir maupun dari bank dan non bank.

2.4.2. Tantangan

1. Isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perdagangan Bebas masih berkembang.
2. Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis.
3. Koordinasi Kab/Kota ke Provinsi belum maksimal.
4. Banyaknya usaha-usaha baru melalui on line dan retail modern.
5. Adanya pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi atau melakukan usaha hanya untuk mendapatkan bantuan.
6. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean Th 2015, ACFTA, AFTA, Globalisasi.
7. Tersedianya alat UTTP ilegal di masyarakat
8. Minimnya jumlah penyedia jasa reparatir alat UTTP
9. Kepentingan pemanfaatan lahan sector pertambangan dan gas termasuk batubara lebih dominan dibandingkan sektor lain, terutama usaha pertanian



Bab 3

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018).



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

Secara normatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

1. “Center Of Excellent”, sebagai salah satu usaha mendapatkan nilai tambah dan daya saing industri belum selesai dibangun

Pengembangan agribisnis memiliki prospek yang cerah untuk meningkatkan nilai tambah industri. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur telah mendirikan “*Center Of Excellent*” yang belum selesai pembangunannya hingga saat ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri yang dapat dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai tambah agribisnis berpeluang ditingkatkan pada semua aspek kegiatan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai pemasarannya, meliputi penyediaan bahan baku berkualitas dan berkesinambungan, pengolahan bahan, dan perluasan pasar produk.

2. Program OVOP (One Village One Product) belum berjalan menyebabkan nilai tambah industri belum optimal

Kementrian Koperasi dan UKM telah mengamanatkan bahwa tujuan Program “*One Village One Product (OVOP)*” untuk mengembangkan produk unggulan daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat. Melalui Program OVOP diharapkan dapat mewujudkan kemandirian, kreativitas, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mendorong masyarakat lebih kreatif dan inovatif. Dengan dorongan Pemerintah Provinsi Kalimantan



Timur secara maksimal, pelaku usaha mikro dan kecil dapat membuat terobosan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas. Pengembangan produk unggulan melalui pendekatan OVOP merupakan salah satu model kegiatan sebagai penjabaran kebijakan pemerintah sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Produk unggulan lokal selain dapat menjadi tuan di negeri sendiri, juga mendunia berbasiskan mutu dan daya saing melalui proses industri pengolahan di wilayah basis usaha.

3. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui sebagai antisipasi pemberlakuan UU Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 pada tahun 2014

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing antara lain ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing produk ekspor juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur pada produk ekspor yang terbaharui.

Berdasarkan UU Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 pada Tahun 2014, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM menilai bahwa larangan pemerintah untuk mengekspor biji ore menyebabkan rendahnya daya



saing produk ekspor dibandingkan negara-negara lain. Implementasi dari UU Minerba tersebut tidak hanya mengakibatkan rendahnya daya saing produk ekspor tetapi juga mengakibatkan banyaknya perusahaan rugi/gulung tikar.

4. Belum Optimalnya perlindungan konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Oleh karena itu, sebagai pengguna barang dan jasa konsumen harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolgian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU PK, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK masih terbatas, serta tempat pengaduan konsumen masih terbatas.



5. Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi

Koperasi mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dimaksud adalah eksistensi produk unggulan yang berkembang melalui koperasi. Saat ini belum ada sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi. Akibatnya, kinerja koperasi dalam perekonomian Indonesia masih sangat diragukan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dalam upaya pengembangan sentra produk unggulan melalui lembaga koperasi. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan produk khas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang dihasilkan dari lembaga koperasi.

6. Lemahnya Daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena diverifikasi usaha yang masih rendah

Peningkatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tergantung pada keefektifan manajemen ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu suatu perusahaan UKM akan berkelanjutan apabila menggunakan informasi atau pengalaman tersebut guna terciptanya kompetensi UKM. Disinilah perusahaan UKM akan mempunyai kompetensi dalam memproduksi produk dan jasa. Dengan demikian UKM tersebut dapat disebut sebagai *sense making*.

Usaha Kecil dan Menengah juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung turut menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara mikro ekonomi UKM keberadaannya sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sector usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur



permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM apakah tumbuh atau mati seringkali sangat sukar terdeteksi.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM, dimana salah satunya adalah keterbatasan pangsa pasar maka strategi pengembangan UKM ini perlu dicermati agar pertumbuhan UKM baru tidak melemahkan UKM yang ada. Oleh karena itu, sebaiknya pembentukan UKM lebih diarahkan untuk pangsa ekspor atau memenuhi kekurangan permintaan dalam wilayah dengan menciptakan produk yang berbeda dengan UKM yang telah ada.

Berdasarkan permasalahan utama di bidang industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dapat diuraikan secara rinci masalah-masalah apa saja yang menjadi kendala di masing-masing bidang. Uraian permasalahan adalah sebagai berikut:

A. Bidang Industri

Di Provinsi Kalimantan Timur telah tumbuh dan berkembang kelompok industri hulu seperti metanol, pupuk, amonia, gas alam cair (liquified natural gas, LNG), dan industri kayu primer. Selain itu telah berkembang pula berbagai jenis industri antara dan hilir seperti industri perekat, galangan kapal percetakan, makanan, dan minuman. Dari berbagai macam jenis industri yang terdapat di Kalimantan Timur, tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi:

1. Daya dukung infrastruktur yang masih rendah (jalan, pelabuhan, bandara, Air bersih, telekomunikasi dan listrik);
2. Belum jelas status lahan dan sistem manajemen pengelola Kawasan Industri di Kabupaten/Kota untuk pengembangan industri;
3. Belum optimalnya ketersediaan dan transfer teknologi di bidang industri;



4. Kualitas dan Kuantitas SDM yang masih terbatas pada jenis industri yang dibutuhkan;
5. Belum optimal melaksanakan pengendalian mutu, sanitasi dan higienis perusahaan UMKM;
6. Klaster industri belum mendapat dukungan yang optimal dari kementerian terkait; dan
7. Alat/mesin kemasan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

B. Bidang Perdagangan

Peningkatan efisiensi dalam bidang perdagangan akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan ekspor migas maupun non migas. Komoditi utama ekspor provinsi Kaltim antara lain pertambangan, hasil kayu olahan, hasil industri kimia, hasil perikanan dan kelautan, hasil hutan ikutan, hasil pertanian dan perkebunan dan hasil industri logam. Dalam upaya Pengembangan dan peningkatan perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri Kalimantan timur ditemui berbagai permasalahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah:

1. Kebutuhan pokok dan strategis sebagian besar masih dipasok dari luar daerah;
2. Pasar yang layak dan gudang bahan pokok belum dimiliki Kabupaten/Kota;
3. Penataan PKL yang masih belum disentuh secara optimal;
4. Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota;
5. Lambatnya Laporan SIUP dan TDP Kabupaten/Kota;
6. Belum Optimal nya perlindungan konsumen;
7. Belum maksimalnya networking pasar luar negeri;
8. Minimalnya informasi /akses pasar luar negeri;



9. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui sebagai antisipasi pemberlakuan UU Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 pada tahun 2014;
10. Kurangnya alat pengujian UTTP yang memenuhi standar;
11. Luasnya cakupan wilayah pelayanan UPTD Metrologi sehingga belum dapat terjangkau seluruhnya; dan
12. Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium pengujian.

C. Bidang Koperasi dan UMKM

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. perkembangan yang memadai dari segi kualitas koperasi dan UMKM. Sebagai dukungan serta bentuk perlindungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dari ketatnya persaingan usaha khususnya pelaku usaha pemodal besar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan produk-produk hukum yang bersifat protektif diantaranya Telah ditetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Perda tentang Pembentukan PT. JAMKRIDA KALTIM yaitu Perda No. 9 Tahun 2012; dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim untuk melindungi pelaku usah mikro kecil menengah dan koperasi. Keadaan itu disebabkan oleh masalah klasik yang dihadapi di dalam koperasi dan UMKM itu sendiri yaitu:

1. Pembentukan PT JAMKRIDA Kalimantan Timur belum operasional;
2. Sulitnya akses kredit perbankan;
3. Dana bergulir yang telah disalurkan terkendala pada penguliran karena tingkat pengembalian tidak lancar;



4. Kurangnya kemampuan anggota dan pengguna koperasi untuk menumbuhkan kemampuan modal sendiri;
5. Diversifikasi usaha masih rendah termasuk rendahnya mutu dan kemasan produk;
6. Pengenalan masyarakat terhadap produk UMKM Masih rendah;
7. Belum adanya pemetaan sentra produk unggulan;
8. Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi;
9. Daya saing UKM rendah;
10. Kurang optimal kemitraan KUKM dengan pengusaha besar; dan
11. Kurang optimalnya pengembangan Wira Usaha Baru.

3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah:

***"Mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri
dan energi ramah lingkungan"***

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan provinsi Kalimantan Timur dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.



Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk identitas dan karakter sumber daya manusia yang berkualitas, melalui pemanfaatan implikasi perkembangan teknologi untuk pengembangan pendidikan baik formal maupun informal.

Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan. Hal ini bertujuan untuk mengelola sektor pertanian dalam arti luas dan nilai tambah dari sektor non migas untuk mendukung program pembangunan daerah.

Misi Ketiga : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata. Hal ini bertujuan untuk mendorong konektivitas antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi.

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya memberi pelayanan publik yang prima, menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.



Misi Kelima : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim. Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dan hanya dapat diwujudkan bila ada keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Selanjutnya berkaitan dengan 5 misi gubernur dalam membangun Kaltim tahun 2014 s/d 2018 tugas fungsi Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi dan UMKM sangat erat kaitannya dengan Misi II yakni Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi yang terbarukan. Misi II ini selanjutnya dibagi atas 2 tujuan yakni 1) tersebut. Terkait dengan misi I dengan sasaran peningkatan pendapatan Perkapita, demikian dengan misi II dengan 10 sasaran utama yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya angka kemiskinan, terkendalinya inflasi, meningkatnya jumlah industri hilir berbasis pertanian, berkembangnya pusat-pusat kawasan industri, meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian, meningkatnya investasi daerah, terpenuhinya kebutuhan pangan dan menurunnya indeks Gini .

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UMKM yang terkait dengan Misi I dan II diatas adalah:

1. Fungsi pokok bidang industri, mencakup melaksanakan dan menyiapkan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro hulu dan hilir, industri logam mesin, elektronika, mekanika,



- transportasi dan aneka (ILMETA), mengkoordinasikan kerja sama kemitraan bidang industri, memberikan masukan saran dalam rangka penerbitan dan usaha industri skala investasi diatas 10 milyar dan kawasan industri lintas kabupaten.
2. Fungsi pokok perdagangan dalam negeri melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran usaha.
 3. Fungsi pokok perdagangan luar negeri melakukan bimbingan teknis pembinaan eksportir, pemantauan dan evaluasi kegiatan ekspor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri, promosi dan misi dagang kerja sama luar negeri dan penerbitan SKA dan API.
 4. Fungsi pokok Bidang koperasi dan UMKM adalah melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis, melaksanakan pembinaan dan pemodalan bagi lembaga koperasi dan sumber daya manusia, fasilitasi pemodalan dan pengembangan pelaku usaha dan pembentukan koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pemantauan/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang koperasi.

Dari 4 pokok tugas pokok diatas ,dijabarkan dalam Fungsi SKPD , maka dapat dijelaskan bahwa misi gubernur dengan sasaran-sasaran yang telah disebutkan diatas mempunyai keterkaitan dengan tugas pokok Dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UMKM. Tugas pokok dan fungsi bidang industri terutama terkait dengan Misi II meningkatkanya jumlah industry hilir berbasis pertanian ,dan berkembangannya pusat pusat kawasan industri serta meningkatnya investasi daerah, tugas pokok dalam fungsi bidang perdagangan dalam dan luar negeri terkait dengan sasaran misi II,



terkendalinya tingkat inflasi, terpenuhinya kebutuhan pangan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tugas pokok dan fungsi bidang koperasi dan umkm terkait sasaran visi II menurunkannya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Perlu dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi bidang-bidang sebagaimana diatas secara umum diarahkan dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang ditetapkan oleh gubernur provinsi Kalimantan Timur, sehingga tidak dapat diartikan bahwa bidang industri hanya terkait dalam sasaran pengembangan industri semata tetapi lebih dari itu juga mencakup keterkaitan dengan sasaran – sasaran lainnya selanjutnya tidak lanjut bahwa bidang industri hanya terkait dengan program pengembangan industri tetapi lebih dari itu cukup keterkaitan fungsi lainnya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota

Keberhasilan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh arah pembangunan dari mitra kerjanya baik mitra kerja di tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut dalam perumusan program kegiatan harus dipastikan sinergitas dengan mitra kerja tersebut.

Visi Kementerian Perindustrian adalah “Memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (sustainable) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”. Misi Kementerian Perindustrian, terutama pada Misi 1 yakni “Mendorong peningkatan nilai tambah industri” dan Misi 6 yakni “Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa” selaras dengan Visi ke 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur yakni “Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi yang terbarukan”. Dalam rangka daya saing ini maka fokus Kalimantan Timur adalah hilirisasi produk, terutama produk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Dinas Perindagkop dan UMKM Kalimantan Timur harus



dapat mengoperasionalkan keselarasan ini secara sinergis sehingga pembangunan Industri di Kalimantan Timur dapat tumbuh secara baik dan berdaya saing tinggi.

Visi Kementerian Perdagangan Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan. Ketersediaan infrastruktur perdagangan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan efisiensi pedagangan atau distribusi barang/jasa dari produsen ke konsumen. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat terbatas infrastruktur perdagangannya. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan menyebabkan tingginya biaya distribusi yang secara langsung akan mempengaruhi harga. Selain Jalan infrastrutur perdagangan yang juga mempengaruhi efisiensi harga adalah bangunan pasar. Sampai saat ini rasio pasar di Kalimantan Timur masing kurang dari 1 pasar untuk 10.000 orang penduduk. Hal ini harus menjadi perhatian para pihak sehingga kebutuhan pokok masyarakat Klaimantan Timur dapat tercukupi dengan harga yang terjangkau.

Visi Kementerian Koperasi dan UMKM “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional”. Kebijakan pembangunan bidang koperasi Kalimantan Timur telah selaras dengan Misi 2 Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu “Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM” dan Misi 3 yaitu Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Gubernur terpilih Kalimantan Timur untuk periode 2013-2018, telah menetapkan program prioritas yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi dan UMKM terutama kewirausahaan dengan menetapkan penciptaan 10.000 wirausahawan baru sebagai salah satu program prioritas unggulan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi.

Agroindustri, daya saing dan ekonomi kerakyatan merupakan beberapa kata yang termuat dalam Renstra Kabupaten/Kota bidang Perindustrian, Perdagangan,



Koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur. Hal ini selaras dengan strategi pembangunan Kalimantan Timur yang berusaha mengurangi ketergantungan pada sumberdaya tidak terbarui. Pembangunan industri pertanian dalam arti luas yang mempunyai kecenderungan padat karya (labour intensive) merupakan wajah pembangunan Kalimantan Timur yang merata dan berkesinambungan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung pencapaian cita-cita ini dengan melakukan sinergi dengan stakeholders terkait.

3.4 Telaahan Terhadap Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan pasal 27 Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2031, Luasan Kawasan Peruntukan Industri di Kalimantan Timur adalah sekitar 8.911 ha. Selanjutnya pada pasal 33, disebutkan bahwa kawasan Peruntukan Industri tersebut meliputi Kawasan Industri, Kawasan Industri Kecil, Kawasan sentra industri UMKM dan Kawasan Industri Rumah Tangga. Rencana Rencana peruntukan kawasan industri diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota Bontang, dan Kabupaten Tana Tidung. Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kaltara maka Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan sudah bukan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi juga disebutkan beberapa Kawasan Strategis Provinsi yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa Kawasan strategis tersebut adalah:



- a. Kawasan Industri Kariangau di Kota Balikpapan;
- b. Kawasan Industri Jasa dan perdagangan di Kota Samarinda
- c. Kawasan Industri Petrokimia di Kota Bontang;
- d. Kawasan Industri Pariwisata Pulau Derawan di Kabupaten Bera;
- e. Kawasan Industri Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu;
- f. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan
- g. Kawasan Industri dan pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur.

Berkenaan dengan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. arahan pembatasan pembangunan perumahan baru disekitar kawasan peruntukan industri; dan
- c. arahan Pengelolaan Kawasan Industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur akan mempedomani Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2031 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dampak negatif program-program prioritas terpilih terhadap isu-isu strategis, dan upaya mitigasi dampak program keseluruhan yang harus dilakukan, maka Pokja Pengendalian Lingkungan telah menghasilkan beberapa butir Rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan dan program RPJMD Kaltim tahun 2014-2018, yaitu antara lain sebagai berikut:



1. Pembangunan: permukiman, pusat industri, industri pariwisata, perkebunan kelapa sawit, wilayah transmigrasi, jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, jalan dan jembatan, jalan tol, transportasi darat, sungai, laut dan udara, adalah merupakan program pembangunan prioritas jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur, yang jika tidak dilakukan upaya-upaya mitigasi, diindikasikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti:
 - a. Terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Terganggunya keanekaragaman hayati (flora dan fauna);
 - c. Perubahan iklim mikro;
 - d. Terganggunya kinerja layanan jasa/jasa ekosistem.Oleh karena itu, guna mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka program-program prioritas tersebut harus dilakukan upaya-upaya mitigasi yang terencana dan terkendali, melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.
2. Untuk program pembangunan klaster-klaster kawasan, harus memperhatikan:
 - a. Mengharuskan semua rencana kawasan industri agar melakukan kajian lingkungan berskala Amdal, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara kumulatif, termasuk kegiatan-kegiatan didalamnya agar juga melakukan kajian lingkungan berskala UKL-UPL;
 - b. Memberi perhatian khusus terkait isu-isu strategis pada klaster kawasan industri berikut:
 - Kawasan Industri Kariangau, Balikpapan, dengan basis aneka industri
 - Kawasan Industri berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang
 - Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, dengan basis kegiatan pada pertanian dan oleochemical
 - c. Memberikan perhatian khusus terkait isu-isu strategis pada klaster kawasan strategis, seperti:



- Kawasan Perbatasan RI-Malaysia, dan menjadikannya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN);
- Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan;
- Kawasan Industri jasa Kota Samarinda, dengan aktivitas utama di sektor jasa dan pusat pemerintahan; dan
- Kawasan Industri Pangan, Kayan Delta Food Estate.

3.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi Dinas

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Dengan demikian setiap rencana program dan kegiatan pembangunan di berbagai sector yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur harus dikaji secara cermat pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembangunan industri, perdagangan dan koperasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masalah-masalah lingkungan sehingga kajian tentang pengaruh program dan kegiatannya terhadap kelestarian lingkungan hidup harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan strategis.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) program rencana jangka panjang yang terindikasi berdampak pada isu strategis lingkungan hidup, yakni :

1. Pengembangan Sentra-sentra industri potensial
2. Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir
3. Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas



Dengan demikian, perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan agar tidak berdampak secara negative terhadap :

1. Terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Terganggunya keanekaragaman hayati (flora dan fauna);
3. Perubahan iklim mikro;
4. Terganggunya kinerja layanan jasa/jasa ekosistem.

Oleh karena itu terhadap semua rencana pengembangan industri dan perdagangan maupun koperasi yang berpeluang menimbulkan dampak lingkungan akan dilakukan kajian lingkungan berskala Amdal, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara kumulatif, termasuk kegiatan-kegiatan didalamnya agar juga melakukan kajian lingkungan berskala UKL-UPL;

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan external dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut di atas diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim yang meliputi:
 - 1) Jumlah pegawai yang memadai
 - 2) Insentif pegawai cukup
 - 3) Adanya motivasi kerja
 - 4) Sarana dan prasarana mencukupi
 - 5) Jumlah aparat Pembina yang memadai
 - 6) Memiliki PPNS-PK



- 7) Koperasi dan UMKM sebagai sektor strategis dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja
- 8) Provinsi /kab/kota sebagai penggerak koperasi
- 9) Pertumbuhan jumlah koperasi dan wira usaha baru di kalangan masyarakat/pemuda
- 10) Koperasi Skala Besar tingkat Provinsi
- 11) Pembentukan Satgas Pengawasan KSP/KJKS/Kopdit
- 12) UU No. 17/2012 yang hanya mengakomodir 4 jenis koperasi sehingga pembinaan lebih focus
- 13) Program pembenahan koperasi tidak aktif
- 14) UU RI No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 15) Permendag No. 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
- 16) Permendag No. 50 Tahun 2009 tentang Penilaian Kemampuan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
- 17) Perda Provinsi Kaltim No. 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana UPTD pada Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim
- 18) Perda Provinsi Kaltim No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- 19) Tersedianya prasarana gedung kantor, laboratorium kalibrasi, workshop (instalasi Uji) dan peralatan standar
- 21) Tersedianya SDM Metrologi Legal (Penera Ahli, Penera Terampil dan Pranata Laboratorium)
- 22) Adanya komitmen pemerintah Daerah Gubernur dan wakil Gubernur untuk mengembangkan kawasan industry dan kawasan ekonomi khusus.
- 23) Adanya komitmen pemerintah daerah Gubernur dan wakil Gubernur untuk



terus mengembangkan program 1 (satu) juta hektar kelapa sawit, dari program Food Estate/rice estate.

- 24) Adanya komitmen pemerintah gubernur dan wakil gubernur untuk terus mengembangkan infrastuktur angkutan darat, laut dan udara.
 - 25) Potensi Sumber Daya Alam yang masih sangat terbarukan untuk di optimalkan pemanfaatannya
 - 26) Jumlah UKM, IKM dan Koperasi yang tersebar di semua kabupaten kota yang cukup besar.
 - 27) Telah ditandatangani beberapa MOU baik oleh Pemerintah pusat, Gubernur dengan investor terkait dengan berbagai program pembangunan di Kalimantan Timur.
 - 28) Adanya daerah otonomi baru semakin mempermudah rentang kendali pelaksanaan dan pembinaan program-program pembangunan.
 - 29) Inflasi yang terkendali sebagai factor pengungkit masuknya insvestor baru.
2. Kelemahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim yang meliputi:
- 1) Disiplin pegawai masih kurang, Sanksi tidak tegas
 - 2) Struktur organisasi belum mantap (penggabungan 3: Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 - 3) Staf belum optimal memahami pekerjaan semua seksi



- 4) Teknologi dan Informasi (IPTEK) belum memadai
- 5) Penempatan pegawai belum sesuai keahlian
- 6) Teknologi Informasi Harga Bahan Pokok masih rendah
- 7) Hubungan dengan distributor bahan pokok belum optimal
- 8) Belum terbentuknya BLU khusus yang mengelola Pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM
- 9) Belum terbentuknya Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagai lembaga konsultasi pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM
- 10) Potensi dan Kompetensi SDM aparat masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal
- 11) Masih belum sinkronnya data koperasi aktif/tidak aktif, berkualitas, sehat/tidak sehat dengan data kab/kota
- 12) Masih rendahnya kualitas dan kesehatan kelembagaan koperasi dan UMKM
- 13) Potensi sumber daya bahan baku belum dimanfaatkan secara optimal
- 14) Masih terbatasnya akses pasar produk Koperasi dan UKM
- 15) Minimnya SDM Metrologi Legal khususnya Penera Ahli, Penera Terampil dan Pranata Laboratorium
- 16) Kurangnya peralatan standar dan instalasi uji
- 17) Cepatnya perkembangan teknologi khususnya alat ukur tidak diimbangi kemampuan SDM Penera
- 18) Terbatasnya sarana mobilitas kemetrologian
- 19) Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- 20) Belum semua Kabupaten/Kota membentuk unit kerja metrologi legal



Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Peluang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi:

- 1 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
- 2 Peraturan Gubernur Kaltim tentang Disiplin Pegawai
- 3 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- 4 Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
- 5 Perkembangan IPTEK Sektor Industri
- 6 Peluang pasar untuk produk industri yang cukup banyak
- 7 Tersedia potensi sumber daya alam yang besar
- 8 Kebijakan-kebijakan Perindustrian pusat terhadap peningkatan daya saing sektor industry
- 9 Kebijakan-kebijakan pusat terhadap Koperasi dan UMKM
- 10 Peluang pasar ekspor yang cukup banyak
- 11 Kebijakan-kebijakan perdagangan pusat terhadap peningkatan daya saing
- 12 Meningkatnya jumlah pasar di daerah
- 13 Perkembangan teknologi yang semakin meningkat
- 14 Meningkatkan sarana teknologi informasi untuk harga bahan pokok
- 15 Melakukan pengawasan peredaran barang/jasa
- 16 Meningkatkan perlindungan konsumen
- 17 Meningkatkan sarana prasarana perdagangan
- 18 Perkembangan IPTEK
- 19 Peluang pasar ekspor yang cukup banyak
- 20 Kebijakan-kebijakan perdagangan pusat terhadap peningkatan daya saing



- 21 UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian, Perda No. 4/2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Perda No. 9/2012 tentang Pembentukan Jamkrida Kaltim, Perda No. 3/2013 tentang Progarm CSR
 - 22 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM
 - 23 Penghargaan bagi Gerakan koperasi/UMKM
 - 24 Pemberian fasilitas UMKM Export.
 - 25 Koperasi Skala Besar tingkat Provinsi
 - 26 Program Pembiayaan baik melalui dana bergulir maupun dari bank dan non bank
 - 27 Program Revitalisasi Koperasi, OVOP
 - 28 Penguatan ekonomi daerah
 - 29 Meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan
 - 30 Meningkatnya jumlah pasar di daerah
 - 31 Perkembangan teknologi yang semakin meningkat
2. Ancaman Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim yang meliputi:
- 1 Kualitas Sumber Daya Manusia kurang
 - 2 isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perdagangan Bebas masih berkembang
 - 3 Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis
 - 4 Kurang cerdasnya konsumen
 - 5 Koordinasi Kab./Kota ke Provinsi belum maksimal
 - 6 Isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perindustrian masih berkembang
 - 7 Masih Ketergantungan Tenaga Ahli dari Luar Daerah
 - 8 Lemahnya perlindungan hukum untuk konsumen
 - 9 Rendahnya informasi dari Kab./Kota pada laporan SIUP-TDP



- 10 Koordinasi Kab/Kota ke Provinsi belum maksimal
- 11 Peredaran barang yang tidak sesuai aturan
- 12 Banyaknya usaha -usaha baru melalui on line dan retail modern
- 13 Adanya pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi atau melakukan usaha hanya untuk mendapatkan bantuan
- 14 Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean Th 2015, ACFTA, AFTA, Globalisasi
- 15 Masuknya produk -produk luar dengan kualitas lebih baik
- 16 UU No. 1/2013 tentang LKM yang membatasi usaha penghimpunan dana masyarakat
- 17 Rendahnya kesabaran masyarakat dalam kegiatan di bidang metrologi legal (tera dan tera ulang alat UTTP)
- 18 Perubahan ekonomi di daerah
- 19 Tersedianya alat UTTP ilegal di masyarakat
- 20 Minimnya jumlah penyedia jasa reparatir alat UTTP
- 21 Meningkatnya perkembangan teknologi di bidang kemetrolgian
- 22 Kepentingan pemanfaatan lahan sector pertambangan dan gas termasuk batubara lebih dominan dibandingkan sector lain, terutama usaha pertanian.
- 23 Mutasi pejabat khususnya yang menangani kemetrolgian di Kabupaten/Kota

Berdasarkan analisis SWOT tersebut serta melihat perkembangan lingkungan rasio nasional, regional dan global melalui isu strategis bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah :

1. Fenomena globalisasi yang membutuhkan daya saing yang lebih kompetitif dan standar-standar baru yang lebih tinggi dalam bidang perdagangan dan industri;
2. Potensi perdagangan dalam negeri yang masih sangat luas dan terbuka untuk dimanfaatkan melalui potensi lokal yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur;



3. Pergeseran paradigma pembangunan Kalimantan Timur dari berbasis migas dan tambang kearah agroindustri;
4. Fenomena krisis ekonomi yang menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM lebih kuat dan stabil sehingga akan menjadi potensi yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan;
5. *Trend global yang mengarah pada green development* membutuhkan kebijakan dan strategi pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM yang lebih ramah lingkungan;
6. Pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM membutuhkan integrasi dan sinkronisasi dengan pengembangan sector laing sehingga menjadi dayadukung bersama dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur;



Bab4

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai organisasi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi organisasi dengan jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik, baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sebuah rumusan umum mengenai keadaan di bidang industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM yang diinginkan dan disepakati seluruh *stakeholders* terkait pada akhir periode renstra, yaitu pada tahun 2018.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Rumusan misi akan membantu lebih jelas penggambaran visi organisasi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh organisasi bersangkutan. Dalam dokumen perencanaan ini, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun kedepan.

4.1. Visi dan Misi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut dengan dilandasi oleh isu-isu strategis dan



permasalahan pembangunan daerah mutakhir, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi :

VISI:

TERWUJUDNYA SEKTOR INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL YANG BERDAYA SAING GLOBAL DIDUKUNG OLEH PERDAGANGAN YANG EFISIEN SERTA KOPERASI DAN UMKM YANG MANDIRI

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini sejalan dengan misi Provinsi Kalimantan Timur khususnya misi : **Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.** Visi yang disepakati oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi Kaltim yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi. Kaltim menyadari ekonomi daerah ini masih berbasis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tambang, minyak dan gas, serta sektor industri dan jasa yang terkait tambang dan migas yang artinya suatu saat akan habis. Kaltim harus sedini mungkin mempersiapkan inovasi baru yang berbasis pada sumber daya lokal, yang dapat diperbaharui dan potensial untuk dikembangkan. Kesadaran akan fenomena tersebut mengarahkan Provinsi Kalimantan Timur untuk menempatkan agribisnis sebagai salah satu potensi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagai prioritas penting.

Agribisnis adalah bisnis/usaha yang berbasis pada pengembangan produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, dll. Agribisnis didukung oleh komoditi unggulan yang dimiliki Kaltim, seperti karet, kemiri, kelapa, kopi, aren, rotan, dan lain-lain. Pengembangan agribisnis Provinsi Kalimantan Timur melibatkan peran koperasi dan UMKM dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Kemandirian koperasi dan UMKM berperan dalam membantu perkembangan ekonomi yang mampu mengangkat taraf hidup kehidupan seluruh masyarakat, terutama



masyarakat Kalimantan Timur. Kemandirian yang dimaksud adalah bahwa anggota koperasi dan masyarakat pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonominya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat lekat dengan usaha di sektor pertanian, terutama para petaninya sebagai pelaku kegiatan produksi disektor pertanian khususnya. Demikian juga dengan koperasi terutama koperasi yang berada di daerah pertanian, sejak awal koperasi juga didudukkan sebagai lembaga ekonomi yang mendukung kegiatan pertanian dengan cara penyaluran pupuk dan peminjam modal bagi petani dan pelaku UMKM.

Pengembangan agribisnis sangat berkaitan dengan agroindustri. Agribisnis memiliki ketahanan usia yang lebih lama dibandingkan dengan industri pertambangan dan migas. Selain itu, industri dalam kerangka agribisnis diyakini juga lebih padat karya sehingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi SDM Kaltim. Pengembangan agribisnis dilakukan sebagai upaya pembangunan pertanian yang selama ini telah dilaksanakan. Pengembangan agribisnis menjadi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Proses agribisnis ini juga melihat keunggulan dan kekhasan lokal untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam berdaya saing dengan daerah lainnya. Suatu daerah dikatakan memiliki daya saing apabila daerah tersebut mempunyai inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Dengan mengembangkan agri bisnis yang dikembangkan dari komoditi unggul daerah Kaltim, maka produk-produk yang dihasilkan dapat berdaya saing dengan produk lainnya. Produk yang terbukti berdaya saing adalah CPO atau minyak sawit mentah yang sampai saat ini masih menjadi nomor satu di dunia. Produk komoditas lainnya seperti karet, kopi, lada, dan kakao juga menjadi komoditi yang kualitasnya masuk dalam kategori terbaik.

Kaltim memiliki banyak kawasan industri yang tersebar di seluruh area Kaltim sebagai penghasil produk-produk unggulan Kaltim. Antara lain Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan Sangkulirang-Sangatta-Muara Wahau (SASAMAWA), Kawasan Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Penajam dan sekitarnya (BONSAMTEBAJAM dan



sekitarnya), serta Kawasan Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya. Kawasan strategis tersebut memiliki sektor-sektor penghasil produk unggulan seperti industri pengolahan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata. Selain itu juga disusun Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang mencakup wilayah Samarinda-Sanga sanga-Muara Jawa-Balikpapan (KAPET SASAMBA). Kawasan agropolitan regional di Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu kawasan pengembangan agribisnis di Kaltim. Pengembangan kawasan agropolitan di daerah Kutai Timur ini dipilih karena pengembangan wilayah kabupaten Kutai Timur diarahkan menjadi Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan perikanan, dan kawasan budidaya peternakan yang sesuai untuk memulai agribisnis. Komoditas utama yang dibudidayakan oleh Kutai Timur adalah karet, kelapa dalam, kelapa sawit dan kakao.

Wilayah agropolitan kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki konsep agro bisnis yang cukup baik, yang diberi nama agropolitan Sangsaka (singkatan Sangkulirang, Sangata, dan Kaliurang) nama wilayah di kabupaten tersebut. Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi:

- a. Menetapkan batasan wilayah agropolitan Sangsaka, dimana Maloy sebagai pusat agroindustri dan pusat pertumbuhan.
- b. Melakukan zonasi komoditas di Kabupaten Kutai Timur dan menetapkan wilayah pengembangan lain yang berfungsi sebagai satelit pertumbuhan agropolitan Sasangka atau pusat pertumbuhan Agribisnis orde kedua
- c. Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, komunikasi, air bersih, energi bagi wilayah agropolitan maupun pengembangan agribisnis wilayah pendukungnya.



4.1.1. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur menetapkan misi antara lain :

- 1. Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan**
- 2. Mengembangkan sentradan produk unggulan lokal berbasis agroindustri.**
- 3. Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, efektif dan pro rakyat.**
- 4. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan**
- 5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur & sarana prasarana pelayanan publik**

Masing-masing misi dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah masih rendahnya daya saing industri di pasar global. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing dimaksud adalah adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi industri nasional adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah, belum terbangunnya struktur klaster (industrial cluster) yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu. Di samping itu proses industrialisasi bisa dilakukan kalau



ada jaminan pasokan bahan baku dengan jenis/varitas, jumlah produksi dan harga yang stabil dan secara ekonomi layak.

Dalam strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termaktub dalam RPJMD 2013-2018, disebutkan bahwa Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diarahkan pada penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan strategi dan kebijakan dimaksud Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur akan menempatkan industri dengan basis sumber daya lokal sebagai titik tolak pembangunan sektor industri dengan harapan disatu sisi industry daerah dapat mengoptimalkan potensi local sehingga mampu memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan rakyat, namun disisi lain industri di Kalimantan Timur memiliki daya saing global dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Mengembangkan sistem perdagangan yang ekonomis, efektif, efisien, dan pro rakyat

Pengembangan sistem perdagangan yang makin baik sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Perdagangan yang efisien, bebas dan pro rakyat merupakan bagian dari keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat. Sistem perdagangan dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan gabungan dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Pembangunan kawasan industri berbasis agro industri dibarengi dengan sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Dalam lingkup perdagangan, pengolahan hasil pertanian menjadi produk



agroindustri ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Semakin tinggi nilai produk olahan, diharapkan pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah juga meningkat serta keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku agroindustri juga relatif tinggi. Peran Disperindagkop dan UMKM disini adalah mendorong sistem perdagangan agro industri yang efisien, bebas dan pro rakyat. Dengan pengembangan sistem perdagangan yang efisien akan mampu dilakukan penyederhanaan dalam proses perdagangan. Sehingga tercipta sistem yang mudah dan cepat dan mampu menekan biaya. Kemudian konsep perdagangan bebas yang akan dikembangkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM diharapkan secara umum mampu meningkatkan peradaban dan kesejahteraan Negara-negara yang terlibat didalamnya. Dengan sistem perdagangan yang pro-rakyat diharapkan mampu menyejahterakan rakyat melalui pemberdayaan hasil rakyat dan dengan dilakukan oleh rakyat dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat. Sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur seutuhnya.

3. Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal berbasis agroindustri

Salah satu elemen visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah Agroindustri, yang merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Fokus ini merupakan kebijakan yang diyakini dapat mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan. Jika komitmen ini disinkronisasi, maka pembangunan lima tahun Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan. Strategi yang dapat dikembangkan berupa pengembangan sentra-sentra dan produk-produk unggulan local yang berbasis agrokomples.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang



menegaskan bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdayasaing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Produk unggulan daerah dimaksud dapat dihasilkan dan dikelola oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju pasar global.

4. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai pilar ekonomi daerah, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UMKM dapat tercapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Pembinaan dan pengembangan UMKM ikut andil dalam pembangunan agro industri di Kaltim. Seperti yang diketahui bahwa bahan baku agro industri tidak semata-mata dari hasil pertanian langsung. Namun perlu adanya pengolahan lebih lanjut untuk menjadi bahan baku agro industri. UMKM bersinergi dengan industri untuk mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku industri yang dibutuhkan.

Selain mengembangkan UMKM, Koperasi Indonesia perlu dilibatkan dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan



pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Koperasi diharapkan ikut andil dalam perannya memajukan sektor industri agro bisnis. Peran koperasi dimaksudkan sebagai peran dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi agroindustri yaitu dalam hal pengadaan bahan baku, menjaga kestabilan harga bahan baku, peminjaman modal, dan pemberian informasi pasar.

5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik

Dalam perspektif manajemen modern, birokrasi pemerintah yang ideal adalah birokrasi yang siap melayani, memberdayakan masyarakat, demokratis, berlegitimasi disertai akuntabilitas yang tinggi, menghargai hak asasi, berwibawa dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta bekerja secara efektif dan efisien. Secara filosofis, untuk mewujudkan profil birokrasi yang ideal bukanlah hal yang mudah dan dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks. Tantangan tersebut dapat berasal dari diri para aparatur birokrasi sendiri maupun pada konsepsi serta sistem dan mekanisme kerja birokrasi yang tidak jarang mengalami deviasi dalam implementasinya.

Unsur utama penggerak kinerja birokrasi adalah aparatur pemerintah khususnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Kesadaran akan posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai elan vital birokrasi ini mengandung konsekuensi logis yang menuntut Pegawai Negeri Sipil baik secara institusional maupun individual terus berbenah diri, melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah.

Hanya dengan memiliki kompetensi yang tinggi aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kompetensi yang merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap perilaku (*attitude*), dapat dibangun melalui berbagai pendekatan, baik



yang dilakukan secara personal maupun kelembagaan, melalui berbagai kebijakan yang komprehensif .

Dalam menerapkan berbagai kompetensi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, aparatur perlu didukung dengan sarana-prasarana pelayanan yang memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian berbagai pelayanan public dapat berlangsung secara prima.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim dalam menetapkan rencana strategik selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tahan dan daya saing Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Era globalisasi adalah adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Untuk mencegah adanya pengaruh globalisasi secara negatif Dinas Perindagkop dan UMKM perlu untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing di sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim.



Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya pertumbuhan sektor industri, dengan indikator persentase pertumbuhan industri;
- Meningkatnya jumlah produk OVOP dan KIID, dengan indikator jumlah produk OVOP dan KIID;
- Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dengan indikator persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
- Meningkatnya jumlah klaster industri pengolahan, dengan indikator jumlah klaster industri pengolahan;
- Meningkatnya kemampuan desain produk unggulan daerah, dengan indikator jumlah desain produk unggulan daerah;
- Meningkatnya pengembangan teknologi tepat guna sesuai potensi daerah, dengan indikator jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah.

2. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien

Sektor perdagangan nasional agar dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional, atau merupakan salah satu pilar strategis bagi kesinambungan kinerja ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dilakukan dengan menyederhanakan sistem perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Memenuhi pasar dalam negeri lebih diutamakan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Terwujudnya sistem distribusi yang efisien, dengan indikator disparitas harga antarwilayah;



- Terkendalinya pasar impor secara efisien, dengan indikator jumlah penurunan impor barang konsumsi;
- Meningkatnya nilai ekspor non migas, dengan indikator nilai ekspor non migas;
- Meningkatnya pengawasan dan pengendalian mutu barang (komoditi produk), dengan indikator jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk.

3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

Pemerintah berkewajiban, berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melakukan upaya pendidikan serta pembinaan kepada konsumen, terutama mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran seberapa besar masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrumen yang sama diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dengan tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen. Selain upaya perlindungan konsumen, Pemerintah wajib melakukan pengamanan pasar dalam negeri untuk mencegah terjadinya perbedaan harga bahan kebutuhan pokok antar daerah yang berbeda-beda.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar, dengan indikator jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun.

4. Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah

Koperasi serta usaha mikro kecil menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu perlu adanya peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam menaikkan nilai pertumbuhan perekonomian daerah.



Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM, dengan indikator jumlah koperasi berkualitas, presentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM, dan persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor koperasi dan UMKM.
- Meningkatnya jumlah wirausaha baru, dengan indikator penumbuhan jumlah WUB dan penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB.
- Meningkatnya sarana prasarana Koperasi dan UMKM, dengan indikator jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM, jumlah koperasi/UMKM yang melakukan kontak dagang, jumlah koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan dan jumlah koperasi/UMKM yang mendapat program pembiayaan.

5. Meningkatkan kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim

Kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim sangat didukung dengan kinerja SDM aparat yang berkualitas yang memiliki peran penting dalam membina pelaku usaha melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) maupun sosialisasi. Selain itu, kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim juga didukung dengan pelayanan publik dengan mekanisme kerja sesuai standar pelayanan minimalis (SPM) dan hasil dari program kegiatan lainnya yang layak dipublikasikan ke masyarakat melalui pemanfaatan sarana publikasi yang tersedia, seperti media cetak (buletin), media massa (koran), media elektronika (website, RRI maupun TVRI) maupun media publikasi (baliho). Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pendekatan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan, dengan indikator jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi;
- Meningkatnya jumlah wirausaha baru, dengan indikator penumbuhan jumlah WUB dan penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB;
- Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik, dengan indikator jumlah sarana pelayanan publik; dan
- Meningkatnya mekanisme kerja internal organisasi, dengan indikator jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi.



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatkan daya tahan dan daya saing Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1	Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri	Persentase pertumbuhan industry	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
						Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry
						Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industry mikro, kecil dan menengah dengan swasta
2	Meningkatnya jumlah produk OVOP dan KIID	Jumlah produk OVOP dan KIID	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Sentra Industri Potensial Berbasis Sumber Daya Lokal		
3	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas	Kegiatan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas		
		4	Meningkatnya jumlah klaster industry pengolahan	Jumlah klaster industri pengolahan	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	Kegiatan Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu – Hilir
						Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		5	Meningkatnya kemampuan desain produk unggulan daerah	Jumlah desain produk unggulan daerah	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
		6	Meningkatnya pengembangan teknologi tepat guna sesuai potensi daerah	Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
2	Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien	7	Terwujudnya sistem distribusi yang efisien	Disparitas harga antarwilayah	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Jasa
						Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah
						Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
						Kegiatan Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP
		Kegiatan Kontak Dagang				
8	Terkendalinya pasar impor secara efisien	Jumlah penurunan impor barang konsumsi	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri		
9	Meningkatnya nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas		Kegiatan Membangun Jejaring dengan Eksporir		
						Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
					Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional
		10	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian mutu barang (komoditi produk)	Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kegiatan Koordinasi Pengujian dan Sertifikat Mutu Barang
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor
3	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri	11	Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar	Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kegiatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah
4	Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	12	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi berkualitas Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan KOPERASI



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		13	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Penumbuhan jumlah WUB	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
				Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Industri
		14	Meningkatnya sarana prasarana Koperasi dan UMKM	Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
				Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kontak dagang		Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
				Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kemitraan		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
				Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan		
5	Meningkatkan kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim	15	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
						Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
	16 Meningkatnya sarana prasarana pelayanan public	Jumlah sarana pelayanan publik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Sistem Informasi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Meubeleurn Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
				Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan
				Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
				Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke dalam daerah
		17 Meningkatkan mekanisme kerja internal organisasi	Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan



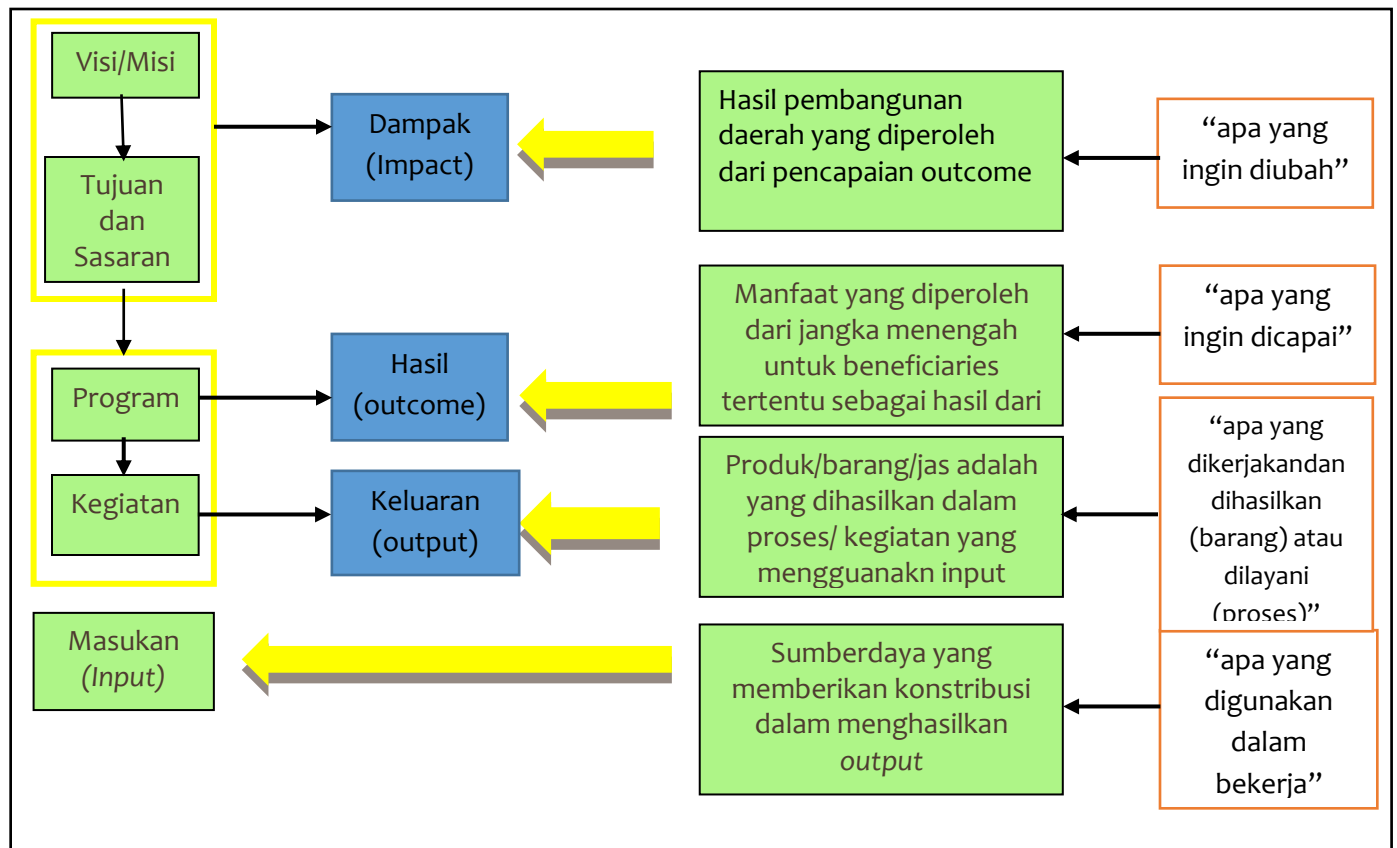
4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Perumusan rencana strategic mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Arsitektur Kinerja pembangunan daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim mengikuti pola sebagai berikut:

Gambar 4.1

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



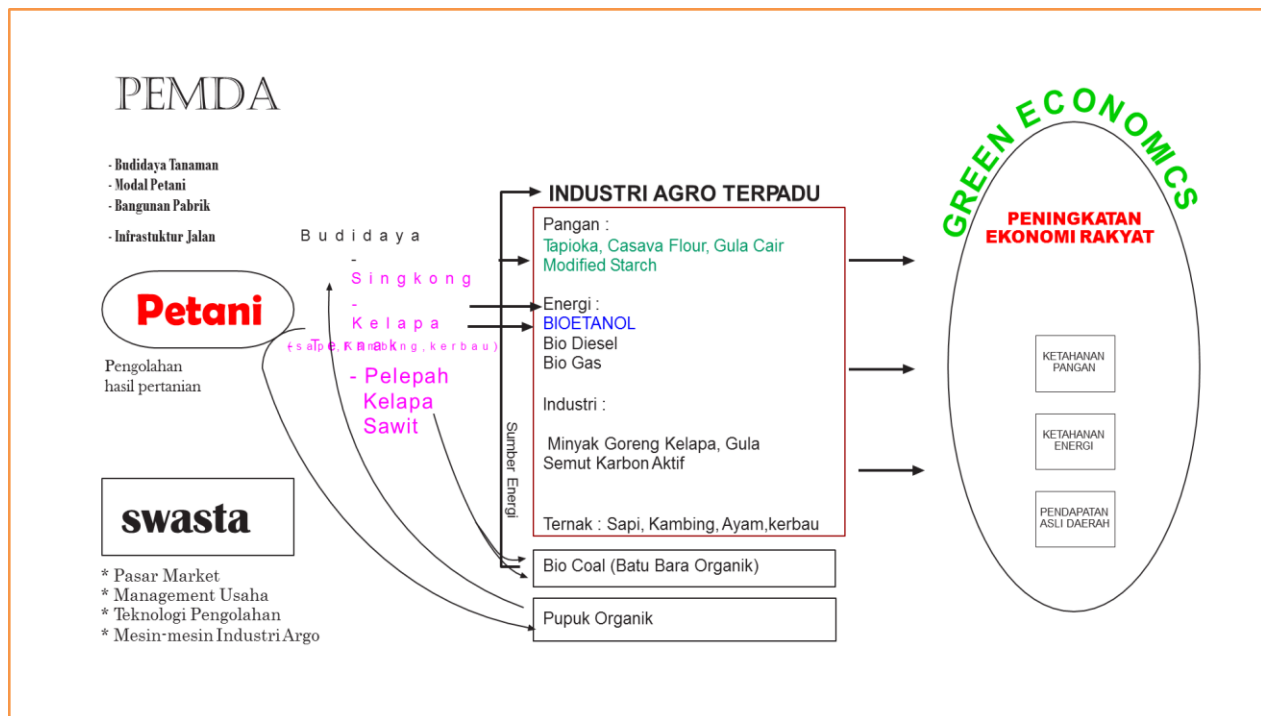


Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim menetapkan 5 (lima) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2013-2018, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi pertama: Mengembangkan agro industri berbasis Sumber Daya Lokal

Gambar 4.2

Kelembagaan dan Target Program Industri Agro Terpadu



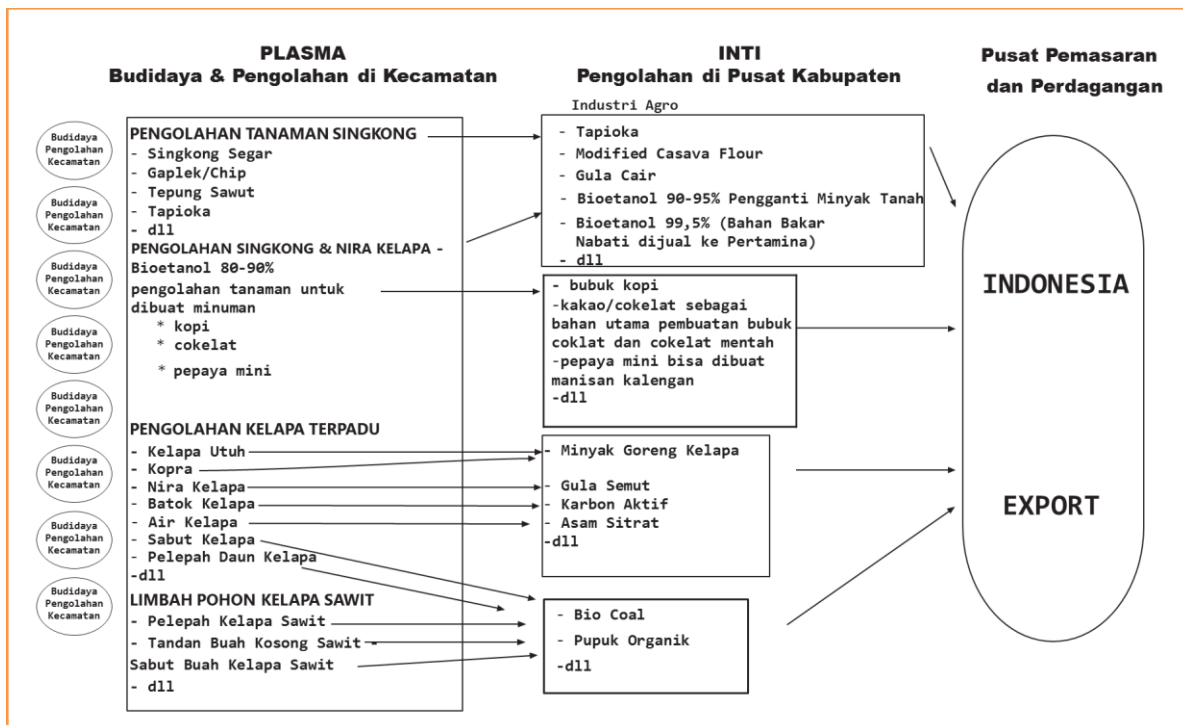
Peluang pada sektor pengembangan atau pengolahan sumberdaya alam diarahkan menjadi industri berbasis potensi daerah dilakukan dengan melakukan pembinaan pada industri mikro, kecil, dan menengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Industri agro terpadu adalah suatu program yang mengintegrasikan kinerja antara Pemda, petani dan pihak swasta yang yang berbasis pada hasil pertanian petani lokal jadi bahan baku utama dan pengolahannya berada pada satu kawasan. Peran masing-masing pihak yaitu, Pemda, petani dan swasta saling ketergantungan satu sama lain. Peran Pemda menjadi awalan



terbentuknya industri agro terpadu. Pemda disini adalah Pemerintah daerah setiap wilayah yang di sini dimaksud adalah kabupaten yang bersinergi dengan kecamatan. Disperindagkop dan UMKM bertugas untuk menyediakan infrastruktur dasar seperti bangunan pabrik. Selain itu Disperindagkop dan UMKM menyediakan modal berdirinya industri agro terpadu. Pihak lainnya yaitu petani bertugas sebagai penyedia bahan baku industri agro. Bahan baku ini sangatlah penting karena industri agro tidak bisa berdiri apabila tidak ada bahan baku sebagai penggerak industri. Pihak swasta sebagai pengendali usaha mempunyai empat fungsi penyedia, yaitu penyedia pasar, penggagas dan perancang management usaha, penyedia teknologi pengolahan dan penyedia mesin-mesin industri agro. Adanya industri agro terpadu ini berfungsi untuk menyongsong green economics sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan. Dalam green economics ini ada tiga aspek yang ingin dicapai yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi dan pendapatan asli daerah.

Gambar 4.3

Alur Proses Nilai Tambah Industri Agro Terpadu





Bisa dilihat dari gambar di atas adalah alur proses nilai tambah industri agro terpadu. Di mulai dari tingkatan plasma di kecamatan yang mempunyai fungsi untuk membudidayakan bahan baku dan mengolahnya menjadi barang setengah jadi untuk kemudian dijual kepada pihak industri. Tingkatan kedua adalah Inti, dimana pengolahan menjadi barang jadi dari barang setengah jadi atau bahan baku utuh di lakukan. Setelah itu proses pemasaran dan perdagangan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia samapai luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk tujuan ekspor.

Tanaman singkong gajah dibudidayakan oleh kabupaten Penajam Paser Utara, dengan banyaknya hasil olahan yang bisa dimanfaatkan diharapkan daerah lain bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Sebagian besar wilayah di Kalimantan Timur membudidayakan komoditas kelapa dalam, kelapa sawit dan karet karena tanaman ini tidak membutuhkan pengairan yang banyak dan sangat cocok tumbuh di tanah yang tidak begitu subur.

Kata kunci strategi ini adalah koordinasi lintas sektor baik vertical maupun horizontal termasuk dengan dinas-dinas pertanian dalam arti luas.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatkan pertumbuhan sektor Industri.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- a. Peningkatan daya saing industri daerah melalui komoditi utama, kompetensi inti industri daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. Mengembangkan industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan terutama agro industri dengan memprioritaskan pembinaan pada industri kecil, dan mikro;
- c. Mengembangkan Komoditas dengan pendekatan klaster industri berbasis komoditi unggulan dan prospektif;
- d. Memperkuat hubungan kerjasama antara Pemda, petani dan swasta;
- e. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian;



- f. Meningkatkan pengawasan produk industri dalam rangka pengawasan SNI;
- g. Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian lokal;
- h. Peningkatan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah di tingkat kecamatan;
dan
- i. Membudidayakan tanaman komoditi yang digunakan sebagai bahan baku industri.

2. Strategi kedua: Pengembangan kompetensi Inti Industri Daerah

Salah satu pendekatan dalam pengembangan kompetensi inti industri adalah dengan konsep *One Village One Product*; untuk meningkatkan daya saing antardesa. Dalam kegiatan ini satu desa harus mempunyai satu produk unggulan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing dalam memakmurkan masyarakat masing-masing desa.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya jumlah produk OVOP dan KIID

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- a. Pengembangan OVOP (one Village One Product)
- b. Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar; dan
- c. Pembangunan dan mengembangkan kawasan industri di beberapa Kabupaten/Kota.

3. Strategi ketiga: Meningkatkan daya saing produk industri

Era pasar bebas sudah mulai masuk di Indonesia. Barang-barang dari luar negeri banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Industri harus membaca peluang pasar di Indonesia maupun luar negeri dengan meningkatkan mutu dan menekan harga. Semakin bagus mutu barang dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat, maka produk lokal dapat bersaing sehat dengan barang impor yang sejenis. Agar harga produk dapat terjangkau pihak industri bisa menggunakan bahan baku dari dalam negeri yang harga



belinya lebih murah daripada bahan baku luar negeri. Pihak industri dan pihak petani dapat bersinergi untuk menghasilkan kerjasama yang baik, dengan cara petani menghasilkan bahan baku yang berkualitas dan pihak industri sebagai pembeli tetap bahan baku.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- a. Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri;
- c. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam negeri dan luar negeri; dan
- d. Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.

4. Strategi keempat: Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Memenuhi pasar kebutuhan dalam negeri harus didahulukan dalam aktivitas perdagangan. Perdagangan luar negeri membawa pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang bersifat positif, ada pula yang negative. Banyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar baik dari jumlah, jenis, dan bentuknya. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk lebih konsumtif, karena semakin banyak barang-barang pilihan yang dapat dikonsumsi. Maka perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan antara aktivitas perdagangan luar negeri dan tingkat efisiensi perdagangan dalam negeri.



Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Terwujudnya sistem distribusi yang efisien;
- Terkendalinya pasar impor secara efisien;
- Meningkatkan nilai ekspor non migas; dan
- Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- a. Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan berusaha dari praktek monopoli perdagangan;
- c. Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan;
- d. Peningkatan ekspor migas dan non migas;
- e. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten/kota;
- f. Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi;
- g. Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional; dan
- h. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan aparatur pembina untuk melakukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.
- i. Peningkatan iklim usaha di pasar dalam negeri.
- j. Perluasan akses pasar luar negeri untuk memasarkan luar negeri.

5. Strategi kelima: Pemberdayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor



tradisional maupun modern. UKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan. Pemberian peran terhadap usaha skala mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu langkah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia sehingga mampu mengangkat citra perekonomian rakyat.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi.
- b. Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
- c. Peningkatan jumlah anggota koperasi.
- d. Peningkatan UMKM dalam mendukung penerimaan devisa melalui ekspor non migas.
- e. Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

6. Strategi keenam: Peningkatan kualitas SDM aparat dalam rangka menunjang kinerja pelayanan public

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang mengarah pada perubahan secara berkelanjutan, perlu diperhatikan pelayanan publik yang didukung oleh SDM yang berkualitas yang mampu menciptakan tata ruang dan manajemen pelayanan publik yang baik. Hal ini sangat berpengaruh dalam penilaian kinerja SKPD setiap tahun, apabila mekanisme internal organisasi dapat berjalan dengan baik maka target kinerja yang akan dicapai per tahun pun dapat mencapai angka realisasi yang optimal.



Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan diklat dalam rangka menunjang kinerja SKPD.
- b. Peningkatan tata ruang dan manajemen pelayanan publik.
- c. Pengembangan organisasi dilengkapi dengan mekanisme kerja internal yang memadai.



**Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan daya tahan dan daya saing Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1	Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri	S1: Mengembangkan agro industri berbasis SDA lokal	Peningkatan daya saing industri daerah melalui komoditi utama, kompetensi inti industri daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
					Mengembangkan agro industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
					Mengembangkan Komoditas pada tiap kecamatan berbasis komoditi unggulan dan prospektif
					Memperkuat hubungan kerjasama antara Pemda, Swasta dan Petani
					Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian
					Meningkatkan pengawasan produk industri dalam rangka pengawasan SNI
					Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian lokal
					Peningkatan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah di kecamatan
					Membudidayakan tanaman komoditi yang digunakan sebagai bahan baku industry
		2	Meningkatnya jumlah produk OVOP dan KIID	S2: Pengembangan kompetensi Inti Industri Daerah	Pengembangan OVOP (One Village One Product)
					Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar.



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

					Pembangunan dan mengembangkan kawasan industri di beberapa Kabupaten/Kota.
		3	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	S3: Peningkatan daya saing produk industri	Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
					Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.
					Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam negeri dan luar negeri.
					Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.
2	Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien	4	Terwujudnya sistem distribusi yang efisien	S4: Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.
		5	Terkendalinya pasar impor secara efisien		Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan berusaha dari praktek monopoli perdagangan.
		6	Meningkatnya nilai ekspor non migas		Diversifikasi pasar ekspor
Peningkatan standar dan mutu produk ekspor					
Peningkatan promosi pasar luar negeri					
Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.					
3	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri	7	Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar	Peningkatan ekspor migas dan non migas.	
				Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten/kota.	
				Penguatan usaha dan lembaga perdagangan	
				Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

					<p>Meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.</p> <p>Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional.</p> <p>Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan aparatur pembina untuk melakukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>Peningkatan iklim usaha di pasar dalam negeri.</p> <p>Perluasan akses pasar luar negeri untuk memasarkan luar negeri.</p>
4	Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	8	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	S5: Pemberdayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi.</p> <p>Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.</p> <p>Peningkatan jumlah anggota koperasi.</p> <p>Peningkatan UMKM dalam mendukung penerimaan devisa melalui ekspor non migas.</p> <p>Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).</p> <p>Peningkatan kualitas SDM aparat maupun pengurus koperasi.</p>
5	Meningkatkan kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim	9	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan	S6: Peningkatan kualitas SDM aparat dalam rangka menunjang kinerja pelayanan publik	Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan diklat dalam rangka menunjang kinerja SKPD
		10	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik		Peningkatan tata ruang dan manajemen pelayanan publik
		11	Meningkatnya mekanisme kerja internal organisasi		Pengembangan organisasi dilengkapi dengan mekanisme kerja internal yang memadai



Bab 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2013-2018), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DISPERINDAGKOP dan UMKM Kalimantan Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini :

A. Program DISPERINDAGKOP dan UMKM Kaltim

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim, yaitu:



I. Sumber Dana Desentralisasi

a. Urusan Wajib Koperasi & UMKM

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kompetitif

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2. Program Penataan Struktur Industri.
3. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
3. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
5. Program Pengendalian Impor.

II. Sumber Dana Dekonsentrasi

a. Koperasi & UMKM

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kaltim

b. Industri

1. Program Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri
2. Program Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

c. Perdagangan

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar Lelang
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

III. Sumber Dana Pembantuan

a. Industri

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah .

b. Perdagangan

Program Pembangunan Pasar Tradisional

B. Kegiatan DISPERINDAGKOP dan UMKM Kaltim

Untuk merealisasikan program kerja prioritas maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan – kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim meliputi:

I. Sumber Dana Desentralisasi

a. Urusan Wajib Koperasi dan UMKM

1. Kegiatan Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.
4. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
5. Kegiatan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro kecil Menengah.
7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.



8. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi.
9. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian.
10. Kegiatan Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.
2. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah.
4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta.
5. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
6. Kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.
7. Kegiatan Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir.
8. Kegiatan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu Barang dan Jasa yang beredar di pasaran, yaitu melakukan pemantauan, pengujian, penyuluhan dan pelatihan teknis.
3. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah.



4. Kegiatan Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional.
5. Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri.
6. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor.
7. Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan.
8. Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha.
9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor.
10. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional.
11. Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
12. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.
13. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.
14. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.
15. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.
16. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional.
17. Kegiatan Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP.
18. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.
19. Kegiatan Misi Dagang.
20. Kegiatan Pasar Lelang Komoditi.
21. Kegiatan Diklat Analisa Pasar dan Pelaporan Perdagangan.



II. Sumber Dana Dekonsentrasi

a. Koperasi & UMKM

1. Kegiatan Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
2. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
3. Kegiatan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

B. Industri

1. Kegiatan Pembudayaan dan Pemasyarakatan
2. Kegiatan Pembuatan Leaflet/Poster
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4. Kegiatan Penyusunan/ Pengumpulan /Pengolahan /Up Dating Data/ Analisa Data dan Statistik
5. Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Program
6. Kegiatan Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi
7. Kegiatan Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan
8. Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita
9. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Mutu IKM
10. Kegiatan Operasional dan Pemberdayaan Unit Pelayanan Pembinaan IKM

C. Perdagangan

1. Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Teknis
2. Kegiatan Pengembangan Distribusi Nasional
3. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan
4. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar
5. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kemetrolgian
6. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi



8. Kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
9. Kegiatan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
10. Kegiatan Misi Dagang Lokal
11. Kegiatan Pameran Produksi Dalam Negeri
12. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
13. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi
14. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
15. Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program
16. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
17. Kegiatan Promosi Dagang, Industri dan Investasi
18. Kegiatan Evaluasi Laporan Kegiatan
19. Kegiatan Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan
20. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perbatasan
21. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

III. Sumber Dana Pembantuan

a. Industri

Pembantuan Pembinaan Industri Kecil Menengah (Tugas Pembantuan) di Kota Samarinda

1. Kegiatan Administrasi Kegiatan
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
3. Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

b. Perdagangan

Pembantuan Pembangunan Pasar Tradisional (Tugas Pembantuan) di Kutai Barat



Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Program Koperasi dan UMKM

Sasaran		• Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S5: Pemberdayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian			
1.	Peningkatan UMKM dalam mendukung penerimaan devisa melalui ekspor non migas	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah unit usaha mikro kecil dan menengah
		Kegiatan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap koperasi dalam rangka mewujudkan koperasi yang sehat
		Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	jumlah wirausaha baru (WUB)
		Kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	jumlah ukm Center yang dibangun
		Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	jumlah Wira Usaha Baru
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan
		Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi unggulan



		Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	
		Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	
		Kegiatan penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah unit UKM unggulan yang mandiri dan berorientasi ekspor
		Kegiatan Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan kesepakatan pengembangan UMKM menjadi pelaku usaha yang mandiri
		Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Program Industri

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri 	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S1: Mengembangkan agro industri berbasis SDA lokal.			
1.	Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	jumlah IKM yang berhasil mengembangkan produk unggulan daerah
		Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yg mampu mngembangkan usaha melalui pelatihan pengolahan komoditi unggulan daerah
			Jumlah sentra industri yang dibentuk melalui penerapan OVOP



		Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang melakukan kemitraan dengan perusahaan
		Kegiatan penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang Industri Kecil dan Menengah	
Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah produk OVOP dan KIID 	
S2: Pengembangan kompetensi inti industri daerah.			
2	Mengembangkan Komoditas dengan pendekatan klaster industri berbasis komoditi unggulan dan prospektif	Program Penataan Struktur Industri	Volume Usaha kawasan industri
		Kegiatan pembinaan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir	Jumlah koordinasi Terselarasnya industri hulu hilir
		Kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Persentase tersedianya sarana industri pengolahan
Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB 	
S3: Peningkatan daya saing produk industri.			
3.	Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan industri dalam adapsi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM unggulan daerah yang berorientasi ekspor
		Kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah tehnologi tepat guna yang dikembangkan oleh pelaku usaha
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	
		Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	



Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Program Perdagangan

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya sistem distribusi yang efisien 	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S4: Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.			
1.	Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	rasio pasar per 10.000 penduduk
		Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	jumlah fasilitas pasar/ bazar yang diberikan kepada masyarakat (unit)
		Kegiatan pengembangan Pasar Lelang Komoditi	Jumlah transaksi yang terjadi melalui pasar lelang
		Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah jenis informasi perdagangan dalam negeri kepada masyarakat
		Kegiatan peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP	jumlah unit usaha yang di monitor dalam penerbitan SIUP dan TDP
		Kegiatan Misi Dagang	Jumlah permintaan komoditi pasar dengan luar provinsi
		Kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	
		Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	
		Kegiatan diklat analisa pasar dan pelaporan perdagangan	
Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar 	
2	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah jenis produk/barang beredar yang diawasi di pasar/pertokoan



		Kegiatan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah MOU yang dihasilkan dari kordinasi/kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen
		Kegiatan peningkatan pengawasan mutu barang dan jasa yang beredar di pasaran yaitu melakukan pemantauan, pengujian, penyuluhan dan pelatihan teknis	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengetahuan para pedagang/distributor terhadap pentingnya perlindungan konsumen
Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya pasar impor secara efisien 	
3	Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional.	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis
		Kegiatan koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	Jumlah fasilitasi UKM layak ekspor dengan pasar potensial
		Kegiatan sosialisasi kebijakan penyederhanakan prosedur dan dokumen ekspor dan Impor	
		Program pengendalian impor	
		Kegiatan pengembangan database informasi potensi unggulan	
Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya nilai ekspor non migas 	
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara
		Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Persentase Ekportir yang mendapatkan informasi pasar produk ekspor Kaltim
		Kegiatan koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah koordinasi berkaitan dengan implementasi ekspor dan impor



	Kegiatan Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor	Jumlah komoditi yang mendapatkan sarana untuk peningkatan mutu barang ekspor
--	---	--

Tabel 5.4
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Program Kesekretariatan

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan 	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S6: Peningkatan kinerja melalui pelayanan publik didukung oleh SDM yang berkualitas.			
1.	Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan diklat dalam rangka menunjang kinerja SKPD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas kualitas SDM aparatur
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase pemenuhan pendidikan dan pelatihan bagi aparat Indagkop
		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparat Indagkop
Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik 	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase kualitas peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase ketersediaan perlengkapan gedung kantor
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

		Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Persentase kualitas mebeleur
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase kualitas pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah obyek yang direhabilitasi
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kualitas peningkatan disiplin aparatur perkantoran yang diperlukan
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya operasional dan aktivitas kerja para aparatur
Sasaran		<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya mekanisme kerja internal organisasi	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran
		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi surat menyurat
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kualitas pelayanan jasa, komunikasi, sumber daya air
		Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kualitas jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase kualitas kebersihan kantor
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis	Persentase penyediaan alat tulis



		Kantor	kantor
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kualitas bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan standar makan dan minum kantor
		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase sinkronisasi program dengan kementerian/ lembaga terkait luar Provinsi
		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Persentase koordinasi program kegiatan dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran
		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi surat menyurat

Pada umumnya rencana program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur ditujukan secara maksimal untuk pembinaan dan pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. Maka dari itu, telah ditentukan kelompok sasaran kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, antara lain:

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Se Kaltim
- b. Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) Se Kaltim



- c. Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Se Kaltim
- d. Eksportir Se Kaltim
- e. Importir Se Kaltim

5.2. Pendanaan Indikatif

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2014 s/d 2018 tercantum pada lampiran Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.



Bab 6

INDIKATOR KINERJA SKPD

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi dana realisasi anggaran, akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana capaian sasaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan hal itu, berikut ini disajikan indikator-indikator sasaran yang akan dicapai tahun 2013-2018, meliputi:



Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2013	2014	2015	2016	2017	
Misi 1 : Mengembangkan kawasan industri bertumpu pada potensi sumber daya terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan								
1.	Persentase pertumbuhan industri	2,3 persen	3,6	4,2	5,1	5,9	6,4	6,9
2.	Jumlah produk OVOP dan KIID	1 produk	4	4	6	8	10	12
3.	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,4 persen	13,1	15,2	17,8	19,3	22,4	24
Misi 2: Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal berbasis agro industri								
6.	Jumlah kluster industri pengolahan	1 kluster	2	2	3	3	4	4
7.	Jumlah desain produk unggulan daerah	2 desain produk	5	7	8	10	12	14
8.	Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah	2 teknologi	4	6	8	10	11	12
Misi 3: Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, bebas dan pro rakyat								
9.	Disparitas harga antarwilayah	10 persen	10	8	8	6	5	4
10.	Jumlah penurunan impor barang konsumsi	286,24 US\$ juta	129,70	103,76	88,20	79,38	75,41	71,60
11.	Nilai ekspor non migas	18,13 US\$ milyar	18,31	18,67	19,04	19,84	20,78	21,46



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

12.	Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk	3 komoditi	3	4	4	4	5	5
13.	Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun	35 item	30	25	20	15	10	10
Misi 4: Mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan								
14.	Jumlah koperasi berkualitas	87 koperasi	200	250	300	400	500	550
15.	Pesentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM	12,74 persen	15	15	20	30	40	40
16.	Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM	55,32 persen	57	60	65	67	70	70
17.	Penumbuhan jumlah WUB	500 WUB	1000	1000	1000	1000	1000	1000
18.	Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB	100 WUB	300	300	300	300	300	300
19.	Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM	50 unit	150	200	250	300	300	300
20.	Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kontak dagang	50 unit usaha	50	75	100	125	150	150
21.	Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kemitraan	100 unit usaha	150	200	250	300	350	350
22.	Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan	50 unit usaha	100	150	200	250	300	300
MISI 5 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan public								
23.	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi	60 orang	50	60	60	70	80	80



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U.M.K.M
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*

24.	Jumlah sarana pelayanan publik	9 layanan publik	10	10	10	11	11	11
25.	Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi	6 dokumen	6	6	6	6	6	6



*Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*



PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

SKPD : [1.15.0100] Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11516	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	S	jumlah wirausaha baru (WUB)	500	0.00	1000	18,526.73	2000	10,380.00	3000	12,800.00	4000	22,500.00	5000	22,500.00		
11516003	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Meningkatnya jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kemitraan antar pelaku usaha	200 unit usaha	0.00		0.00	100 unit usaha	500.00	150 unit usaha	500.00	200 unit usaha	500.00	250 unit usaha	500.00	Bidang Koperasi & UMKM	Kab. Paser,Kab. Kutai Barat,Kab. Kutai Kartanegara,Kab. Kutai Timur,Kab. Berau,Kab. Penajam Kota Balikpapan
11516005	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi		jumlah ukm Center yang dibangun	80 UKM center	0.00	2 UKM center	6,337.38	1 UKM center	2,300.00	1 UKM center	2,300.00	1 UKM center	2,000.00	1 UKM center	2,000.00	Bidang Koperasi & UMKM	Nunukan (lanjutan), Kubar ,Berau
11516006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		jumlah Wira Usaha Baru	300 WUB	0.00	1000 WUB	12,189.35	200 WUB	7,580.00	200 WUB	10,000.00	500 WUB	20,000.00	500 WUB	20,000.00	Bidang Koperasi & UMKM	Kab. Paser,Kab. Kutai Barat,Kab. Kutai Kartanegara,Kab. Kutai Timur,Kab. Berau,Kab. Penajam Paser Utara,Kota Balikpapan,Kota Samarinda,Kota Bontang
11517	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	S	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	50	0.00	60	16,414.10	130	1,000.00	200	1,500.00	280	1,500.00	400	1,500.00		
11517003	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi		Meningkatnya jumlah UKM yang menerima bantuan peralatan dari pemerintah	0 UKM	0.00	50 UKM	13,861.60	0 UKM	0.00	0 UKM	0.00	0 UKM	0.00	0 UKM	0.00	Bidang Koperasi & UMKM	Kab. Paser,Kab. Kutai Barat,Kab. Kutai Kartanegara,Kab. Kutai Timur,Kab. Berau,Kab. Penajam Paser Utara,Kota Balikpapan,Kota Samarinda,Kota Bontang
11517005	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Meningkatnya jumlah monitoring dan evaluasi terhadap koperasi dalam rangka mewujudkan koperasi yang sehat	14 kali	0.00	200 kali	738.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Bidang Koperasi & UMKM	Kota Samarinda

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11517009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah		Meningkatnya jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk	6 IKM	0.00	10 IKM	1,814.50	50 IKM	1,000.00	50 IKM	1,500.00	50 IKM	1,500.00	50 IKM	1,500.00	Bidang Koperasi & UMKM	Kota Samarinda , Luar Daerah
11518	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	S	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	0	0.00	0	2,834.08	10	1,500.00	20	2,000.00	30	2,000.00	40	2,000.00		
11518001	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi		Jumlah koperasi unggulan	10 jumlah koperasi unggulan (10 Kab/kota)	0.00	25 jumlah koperasi unggulan (10 Kab/kota)	2,834.08	40 jumlah koperasi unggulan (10 Kab/kota)	1,500.00	40 jumlah koperasi unggulan (10 Kab/kota)	2,000.00	40 jumlah koperasi unggulan (10 Kab/kota)	2,000.00	40 jumlah koperasi unggulan (10 Kab/kota)	2,000.00	Bidang Koperasi & UMKM	
11524	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	S	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB	24 Triliun	0.00	24 Triliun	0.00	26 Triliun	1,000.00	32 Triliun	1,200.00	35 Triliun	1,200.00	38,4 Triliun	1,200.00		
11524001	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas		jumlah kordinasi industri pengolahan	0 Pertemuan Pelaku Industri	0.00	0 Pertemuan Pelaku Industri	0.00	3 Pertemuan Pelaku Industri	1,000.00	4 Pertemuan Pelaku Industri	1,200.00	4 Pertemuan Pelaku Industri	1,200.00	4 Pertemuan Pelaku Industri	1,200.00	Bidang industri	Kota Balikpapan,Kota Samarinda
20616	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	S	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	2	0.00	3	415.30	6	415.00	11	415.00	16	415.00	21	415.00		
20616005	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional		Jumlah fasilitasi UKM layak ekspor dengan pasar potensial	2 Pameran	0.00	2 Pameran	415.30	2 Pameran	415.00	3 Pameran	415.00	3 Pameran	415.00	3 Pameran	415.00	Bidang Perd Luar Negeri	Kota Samarinda,Luar Daerah,Luar Negri
20617	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	S	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara	4 Juta US\$	0.00	5 Juta US\$	9,321.67	7 Juta US\$	6,550.00	9 Juta US\$	3,050.00	12 Juta US\$	3,050.00	15 Juta US\$	3,050.00		
20617002	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri		Persentase Ekportir yang mendapatkan informasi pasar produk ekspor kaltim	4 Persen	0.00	70 Persen	543.60	70 Persen	300.00	85 Persen	300.00	90 Persen	300.00	95 Persen	300.00	Bidang Perd Luar Negeri	Kota Samarinda
20617008	Membangun jejaring dengan eksportir		Meningkatnya jumlah kerjasama promosi dengan ITPC di beberapa negara	4 Negara	0.00	6 Negara	2,042.40	8 Negara	1,500.00	6 Negara	2,000.00	12 Negara	2,000.00	14 Negara	2,000.00	Bidang Perd Luar Negeri	Kota Samarinda,Luar Daerah,Luar Negri
20617009	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha		Meningkatnya jumlah koordinasi berkaitan dengan implementasi ekspor dan impor	2 koordinasi	0.00	3 koordinasi	196.15	3 koordinasi	250.00	4 koordinasi	250.00	4 koordinasi	250.00	4 koordinasi	250.00	Bidang Perd Luar Negeri	Kota Samarinda,Luar Daerah,Luar Negri

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20617011	Peningkatan kapasitas lab pengujian mutu barang ekspor dan impor		Meningkatnya sarana untuk peningkatan mutu barang ekspor	0 Peralatan Laboratorium Pengujian	0.00	100%(Penyelesaian Pembangunan Lantai 2 Gedung) Peralatan Laboratorium Pengujian	6,539.52	100%(Peralatan Laboratorium Pengujian) Peralatan Laboratorium Pengujian	4,500.00	100%(Peralatan Laboratorium Pengujian) Peralatan Laboratorium Pengujian	500.00	100%(Peralatan Laboratorium Pengujian) Peralatan Laboratorium Pengujian	500.00	100%(Peralatan Laboratorium Pengujian) Peralatan Laboratorium Pengujian	500.00	UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Kota Samarinda
20618	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	S	rasio pasar per 10.000 penduduk	0,96	0,00	0,96	13,408.38	0,97	3,337.72	0,98	3,625.00	0,99	7,625.00	1	7,625.00		
20618003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/jasa		Meningkatnya jumlah fasilitas pasar/bazar yang diberikan kepada masyarakat	3 Bazar dan Pasar	0.00	5 Bazar dan Pasar	10,988.92	Bazar 40 titik Bazar dan Pasar	2,000.00	Bazar 40 Titik Bazar dan Pasar	2,000.00	1 unit Pasar , Bazar 40 Titik Bazar dan Pasar	6,000.00	1 unit Pasar , Bazar 40 Titik Bazar dan Pasar	6,000.00	Bidang Perd Dalam Negeri	Kab. Kutai Timur,Kab. Berau,Kab. Kutai Barat,Kab. Paser
20618005	Pengembangan Pasar Lelang Daerah		Meningkatnya jumlah transaksi yang terjadi melalui pasar lelang	10 transaksi	0.00	15 transaksi	403.00	10 transaksi	125.00	10 transaksi	125.00	10 transaksi	125.00	10 transaksi	125.00	Bidang Perd Dalam Negeri	Kota Samarinda
20618006	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		Meningkatnya jumlah jenis informasi perdagangan dalam negeri kepada masyarakat	3 laporan Harga 10 kab/kota	0.00	4 laporan Harga 10 kab/kota	1,160.09	4 laporan Harga 10 kab/kota	500.00	4 laporan Harga 10 kab/kota	500.00	4 laporan Harga 10 kab/kota	500.00	4 laporan Harga 10 kab/kota	500.00	Bidang Perd Dalam Negeri	Kota Samarinda
20618011	Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP		Meningkatnya jumlah kab kota yang di monitor dalam penerbitan SIUP dan TDP	14 Laporan 10 kab.kota	0.00	2 Laporan 10 kab.kota	244.40	2 Laporan 10 kab.kota	200.00	2 Laporan 10 kab.kota	200.00	2 Laporan 10 kab.kota	200.00	2 Laporan 10 kab.kota	200.00	Bidang Perd Dalam Negeri	Kota Samarinda
20618013	Kontak Dagang		Meningkatnya jumlah permintaan pasar dengan luar provinsi	10 komoditi	0.00	12 komoditi	611.98	12 komoditi	512.72	12 komoditi	800.00	12 komoditi	800.00	12 komoditi	800.00	Bidang Perd Dalam Negeri	Kota Samarinda , Luar Daerah
20631	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	S	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	2	0.00	2	1,046.95	4	0.00	6	0.00	8	0.00	10	0.00		
20631001	Fasilitasi pembangunan sentra industri potensial berbasis sumber daya lokal				0.00		1,046.95		0.00		0.00		0.00		0.00	Bidang industri	Kota Samarinda
20717	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	S	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	3 IKM	0.00	3 IKM	700.00	5 IKM	1,000.00	8 IKM	1,200.00	10 IKM	1,200.00	14 IKM	1,200.00		

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20717001	Pembinaan kemampuan teknologi industri		Jumlah IKM yang mutu produknnya layak ekspor	unit IKM	0.00	0	700.00	60	1,000.00	80	1,200.00	100	1,200.00	120	1,200.00	Bidang industri	Kota Samarinda
20732	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	S	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	135	0.00	135	1,333.48	140	25,500.00	150	26,500.00	160	14,000.00	170	1,500.00		
20732008	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir		Jumlah koordinasi Terselarasnya industri hulu hilir		0.00	9 laporan	1,333.48	9 laporan	1,500.00	9 laporan	1,500.00	9 laporan	1,500.00	16 laporan	1,500.00	Bidang industri	Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara
20732010	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri		Pekerjaan Persiapan Pembangunan Gedung, Pembangunan Infrastruktur		0.00		0.00	100 persen	24,000.00	100 persen	25,000.00	100 persen	12,500.00		0.00	Bidang industri	Kab Kutai Timur
11522	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	M	tingkat pencapaian kinerja AKIP Dinas Perindagkop & UMKM	69 Nilai AKIP	0.00	70 Nilai AKIP	0.00	71 Nilai AKIP	3,850.00	72 Nilai AKIP	3,850.00	75 Nilai AKIP	3,850.00	76 Nilai AKIP	3,850.00		
11522001	Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM		Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Disperindagkop & Umkm		0.00	69 Nilai AKIP	0.00	70 Nilai AKIP	3,850.00	71 Nilai AKIP	3,850.00	72 Nilai AKIP	3,850.00	73 Nilai AKIP	3,850.00	Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan)	Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Luar Daerah
11523	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	M	tingkat kepuasan layanan informasi bidang indagkop & UMKM		0.00		0.00	70% Persen	1,000.00	75% Persen	1,000.00	80% Persen	1,000.00	80% Persen	1,000.00		
11523001	Pengelolaan sumber daya sistem informasi		terkelolanya sistem informasi melalui media informasi		0.00		0.00	85 persen	1,000.00	85 persen	1,000.00	85 persen	1,000.00	90 persen	1,000.00	Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan)	Kota Samarinda
12017	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		0.00	100 persen	1,900.20	100 persen	2,017.60	100 persen	2,028.80	100 persen	2,028.80	100 persen	2,028.80		
12017021	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		persentase kualitas Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		0.00	100 persen	1,900.20	100 persen	2,017.60	100 persen	2,028.80	100 persen	2,028.80	100 persen	2,028.80	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, UPT. Kemetrologian Daerah, UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11515	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	T	terciptanya UKM unggulan yang mandiri dan berorientasi ekspor	1 unit usaha	0.00	2 unit usaha	8,792.93	2 unit usaha	1,400.00	2 unit usaha	1,400.00	2 unit usaha	1,400.00	2 unit usaha	1,400.00		
11515006	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah		Meningkatnya kordinasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan kesepakatan pengembangan UMKM menjadi pelaku usaha yang mandiri	5 kesepakatan	0.00	5 kesepakatan	6,827.83		0.00		0.00		0.00		0.00	Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan)	Kota Samarinda

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11515008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah		Meningkatnya jumlah UMKM yang memperoleh bantuan peralatan untuk menembangkan usaha	100 UMKM	0.00	110 UMKM	1,965.10	100 UMKM	1,400.00	100 UMKM	1,400.00	100 UMKM	1,400.00	100 UMKM	1,400.00	Bidang Koperasi & UMKM	Kota Samarinda
20615	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	T	Berkurangnya jumlah jenis produk/barang beredar yang diawasi di pasar/pertokoan	35 buah	0.00	35 buah	3,155.68	30 buah	4,536.30	30 buah	3,750.00	30 buah	3,750.00	30 buah	3,750.00		
20615001	koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen		Meningkatnya kordinasi/kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen	4 mou	0.00	5 mou	500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Kota Samarinda
20615003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		Meningkatnya pengetahuan para pedagang/distributor terhadap pentingnya perlindungan konsumen	14 Laporan 10 Kab/Kota	0.00	Laporan 10 Kab/kota Laporan 10 Kab/Kota	942.91	Laporan 10 Kab/kota Laporan 10 Kab/Kota	1,000.00	Laporan 10 Kab/kota Laporan 10 Kab/Kota	1,000.00	Laporan 10 Kab/kota Laporan 10 Kab/Kota	1,000.00	Laporan 10 Kab/kota Laporan 10 Kab/Kota	1,000.00	Bidang Perd Dalam Negeri	Kota Samarinda
20615004	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah		Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan tera/tera ulang pada alat UTTP	6900 UTTP	0.00	7200 UTTP	1,712.76	7200 UTTP	2,536.30	7300 UTTP	2,000.00	7400 UTTP	2,000.00	7400 UTTP	2,000.00	UPT. Kemetrolgian Daerah	Kab. Paser,Kab. Kutai Barat,Kab. Kutai Kartanegara,Kab. Kutai Timur,Kab. Berau,Kab. Penajam Paser Utara,Kota Balikpapan,Kota Samarinda,Kota Bontang
20615006	Koordinasi pengujian dan sertifikat mutu barang		Meningkatnya koordinasi/kerjasama dengan lembaga perlindungan		0.00		0.00	12 bulan	1,000.00	12 bulan	750.00	12 bulan	750.00	12 bulan	750.00	UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Kota Samarinda
20619	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	T	jumlah pembinaan kawasan pedagang kaki lima dan asongan	2 kawasan	0.00	2 kawasan	2,222.00	2 kawasan	0.00	2 kawasan	0.00	2 kawasan	0.00	2 kawasan	0.00		
20619003	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan		Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang mendapatkan fasilitasi penataan tempat berusaha	150 PKL	0.00	200 PKL	2,222.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Bidang Perd Dalam Negeri	Kab. Paser,Kab. Kutai Barat,Kab. Kutai Kartanegara,Kab. Kutai Timur,Kab. Berau,Kab. Penajam Paser Utara,Kota Balikpapan,Kota Samarinda,Kota Bontang

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20715	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	T	Meningkatnya Jumlah IKM unggulan daerah yang berorientasi ekspor	2 Jumlah IKM	0.00	3 Jumlah IKM	2,792.93	5 Jumlah IKM	2,176.90	8 Jumlah IKM	3,000.00	10 Jumlah IKM	3,000.00	14 Jumlah IKM	3,000.00		
20715005	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri		Meningkatnya jumlah tehnologi tepat guna yang dikembangkan oleh pelaku usaha	10 buah	0.00	15 buah	2,792.93	20 buah	2,176.90	25 buah	3,000.00	30 buah	3,000.00	35 buah	3,000.00	UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
20716	Program pengembangan industri kecil dan menengah	T	Meningkatnya jumlah IKM yang berhasil mengembangkan produk unggulan daerah	35 jumlah IKM	0.00	60 jumlah IKM	6,345.06	91 jumlah IKM	6,950.00	124 jumlah IKM	10,350.00	155 jumlah IKM	10,350.00	189 jumlah IKM	20,350.00		
20716001	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya		Jumlah IKM yg mampu mngembangkan usaha melalui pelatihan pengolahan komoditi unggulan daerah ,Jumlah Pabrik		0.00	220 unit usaha	4,697.96	Pabrik rumput laut dibontang dan hiliriasiasi singkong	6,200.00	10 IKM unit usaha	10,000.00	10 IKM unit usaha	10,000.00	20 IKM unit usaha	20,000.00	Bidang Industri	Kota Samarinda,Luar Daerah,Luar Negri,Kab. Paser,Kab. Kutai Barat,Kab. Kutai Kartanegara,Kab. Kutai Timur,Kab. Berau,Kab. Penajam Paser Utara,Kota Balikpapan,Kota
			Jumlah sentra industri yang dibentuk melalui penerapan OVOP	1 sentra		4 sentra		4 sentra		6 sentra		8 sentra		10 sentra			
20716002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri		Terfasilitasinya pembuatan kajian pengolahan potensi unggulan didukung dengan pendampingan	0 buah	0.00	1 buah	1,029.20		0.00		0.00		0.00		0.00	Bidang Industri	Kota Samarinda
20716006	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta		Meningkatnya jumlah IKM yang melakukan kemitraan dengan perusahaan .	30 Pameran hasil Industri	0.00	2 Pameran hasil Industri	617.90	2 Pameran hasil Industri	750.00	2 Pameran hasil Industri	350.00	2 Pameran hasil Industri	350.00	2 Pameran hasil Industri	350.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Kota Samarinda
11501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	0.00	100 persen	6,179.80	100 persen	6,541.70	100 persen	7,364.20	100 persen	6,866.70	100 persen	7,266.70		
11501001	Penyediaan jasa surat menyurat		persentase pelayanan administrasi surat menyurat		0.00	100 Persen	62.00	100 Persen	74.00	100 Persen	89.00	100 Persen	89.00	100 Persen	89.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolagian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11501002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		persentase kualitas pelayanan jasa , komunikasi, sumber daya air		0.00	100 Persen	985.60	100 Persen	1,133.50	100 Persen	1,431.00	100 Persen	1,133.50	100 Persen	1,133.50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolagian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11501003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		% kualitas jasa peralatan dan perlengkapan kantor		0.00	100 persen	477.30	100 persen	592.80	100 persen	667.80	100 persen	667.80	100 persen	667.80	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11501006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		% Penyediaan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional		0.00	100 persen	69.45	100 persen	84.50	100 persen	89.50	100 persen	89.50	100 persen	89.50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11501008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		persentase kualitas kebersihan kantor		0.00	100 persen	580.00	100 persen	680.00	100 persen	695.00	100 persen	695.00	100 persen	695.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11501010	Penyediaan alat tulis kantor		persentase penyediaan alat tulis kantor		0.00	100 persen	240.00	100 persen	263.00	100 persen	278.00	100 persen	278.00	100 persen	278.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11501011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan		0.00	100 persen	265.00	100 persen	243.20	100 persen	275.70	100 persen	275.70	100 persen	275.70	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Kota Samarinda
11501012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0.00	100 Persen	199.50	100 Persen	217.70	100 Persen	242.70	100 Persen	242.70	100 Persen	242.70	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11501015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		persentase Kualitas bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0.00	100 persen	102.50	100 persen	117.50	100 persen	117.50	100 persen	117.50	100 persen	117.50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11501017	Penyediaan makanan dan minuman		persentase Pemenuhan standar makan dan minum kantor		0.00	100 persen	450.00	100 persen	472.50	100 persen	490.00	100 persen	490.00	100 persen	490.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrologian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11501018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		persentase sinkorasi program dengan kementerian /lembaga terkait luar Provinsi		0.00	90 persen	1,888.45	90 persen	1,526.00	90 persen	1,776.00	90 persen	1,576.00	90 persen	1,976.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrologian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Luar Daerah
11501019	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah		persentase koordinasi program kegiatan dengan kabupaten kota dalam provinsi		0.00	90 persen	860.00	90 persen	1,137.00	90 persen	1,212.00	90 persen	1,212.00	90 persen	1,212.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrologian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	10 Kab Kota
11502	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	persentase kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	0.00	100 persen	26,610.73	100 persen	33,668.10	100 persen	25,219.40	100 persen	23,666.90	100 persen	25,185.50		
11502003	Pembangunan gedung kantor		jumlah pembangunan gedung kantor	1 unit	0.00	1 unit	17,291.80	2 unit	26,201.20	1 unit	20,000.00	1 unit	20,000.00	1 unit	15,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrologian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11502005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional	0 unit	0.00	4 unit	2,625.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrologian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11502007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Persentase Ketersediaan perlengkapan gedung kantor		0.00	100 persen	1,192.50	100 persen	859.80	100 persen	859.80	100 persen	859.80	100 persen	3,805.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrologian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11502009	Pengadaan peralatan gedung kantor		persentase ketersediaan peralatan gedung kantor		0.00	100 persen	2,189.75	100 persen	4,079.10	100 persen	1,879.10	100 persen	1,079.10	100 persen	2,800.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrologian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Kota Samarinda

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11502010	Pengadaan mebeleur		persentase kualitas mebeleur		0.00	100 persen	1,501.50	100 persen	1,247.50	100 persen	1,000.00	100 persen	447.50	100 persen	2,300.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Kota Samarinda
11502022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		persentase kualitas pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		0.00	100 persen	1,367.45	100 persen	734.00	100 persen	734.00	100 persen	734.00	100 persen	734.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Kota Samarinda
11502024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		0.00	100 persen	442.73	100 persen	546.50	100 persen	746.50	100 persen	546.50	100 persen	546.50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
11502042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		jumlah obyek yang di rehab		0.00		0.00	2 obyek	0.00	2 obyek	0.00	2 obyek	0.00	2 obyek	0.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Kota Samarinda
11503	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Persentase kualitas peningkatan disiplin aparaturperkantoran yang diperlukan	100 Persen	0.00	100 Persen	524.30	100 Persen	344.20	100 Persen	344.20	100 Persen	380.50	100 Persen	344.20		
11503002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Meningkatnya operasional dan aktivitas kerja para aparatur	157 orang	0.00	165 orang	524.30	165 orang	344.20	170 orang	344.20	170 orang	380.50	170 orang	344.20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda
			Persentase Pemenuhan Baju Dinas Pegawai			100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
11505	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	persentase peningkatan kualitas SDM aparatur	100 Persen	0.00	100 Persen	1,515.00	100 Persen	906.60	100 Persen	842.90	100 Persen	806.60	100 Persen	834.80		

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										UNIT KERJA SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11505001	Pendidikan dan pelatihan formal		persentase Pemenuhan Pendidikan dan pelatihan Bagi Aparat Indagkop	210 %	0.00	100 %	1,450.00	100 %	875.00	100 %	811.30	100 %	775.00	100 %	803.20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kota Samarinda, Luar daerah
11505002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		persentase Pemenuhan Kebutuhan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bagi Aparat Indagkop		0.00	100 %	65.00	100 %	31.60	100 %	31.60	100 %	31.60	100 %	31.60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,UPT. Kemetrolgian Daerah,UPT. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang,UPTD Pusat Pengembangan Promosi Kerajinan (P3K)	Kalimantan Timur
JUMLAH					0.00		124,039.30		114,074.12		111,439.50		110,589.50		110,000.00		

Samarinda , Juli 2014
Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm

(H. MOHAMMAD DJAILANI)
NIP. 195705251982031006